

**STUDI FAKTOR - FAKTOR
PERKEMBANGAN KOTA MAROS, KAB. MAROS**

Skripsi

*Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
Dalam Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota*



OLEH :

SUGENG PRESTIHARYONO
4586040561

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2001

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : **STUDI FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGAN
KOTA MAROS, KABUPATEN MAROS**

Nama Mahasiswa : **SUGENG PRESTIHARYONO**

Nomor Pokok/Nirm : **4586040561/871134505**

Jurusan : **TEKNIK PLANOLOGI**

Menyetujui,

Pembimbing I


Ir. H. Ambo Enre BS., MSi

Pembimbing II



Drs. H. Abd. Azis Mattola, MSP

Pembimbing III



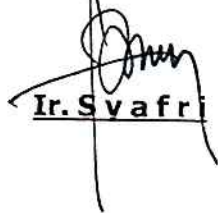
Ir. Burhanuddin Badrun

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik
Universitas "45" Makassar


Ir. Mursyid Mustafa, MSi
Nip. 131 914 639

Ketua Jurusan Teknik Planologi
Fakultas Teknik
Universitas "45" Makassar


Ir. Svafri

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Makassar, Nomor SK. 159/01/U-45/III/2001 Tanggal 27 Maret 2001 tentang **PANITIA** dan **TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**, maka :

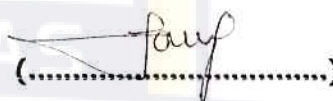
Pada Hari/Tanggal : Jum'at/30 Maret 2001
Skripsi Atas Nama : **SUGENG PRESTIHARYONO**
Nomor Pokok/NIRM : 4586040561/871134505

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Akhir Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar, setelah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara jenjang Strata Satu (S-1), pada jurusan Teknik Planologi, Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar.



PENGAWAS UMUM

DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA
(Rektor Universitas "45" Makassar)


(.....)

TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Ketua : Ir. H. Louis Santoso, MSi
Sekretaris : Ir. Syafri
Anggota : Ir. R. Tangkaisari, MSP
Ir. Hamid Umar, MSi
Ir. Murshal Manaf, MSP
Ir. H. Ambo Enre BS., MSi
Drs. H. Abd. Azis Mattola, MSP
Ir. Burhanuddin Badrun


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

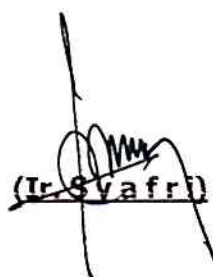
(.....)

Disahkan :
Rektor Universitas "45"
Makassar



(DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA)

Diketahui :
Ketua Jurusan Planologi
Fakultas Teknik
Universitas "45" Makassar


(Ir. Syafri)

ABSTRAK

Tugas akhir yang diberi judul “Studi Faktor-Faktor Perkembangan Kota Maros, Kabupaten Maros” ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh kedua faktor utama perkembangan kota, yaitu penduduk dan kegiatan fungsional kota, dalam mempengaruhi perkembangan setiap kelurahan yang ada di Kota Maros pada khususnya dan perkembangan Kota Maros itu sendiri pada umumnya.

Lokasi penelitian (daerah studi) adalah Kota Maros, yaitu Ibukota Kabupaten Maros, yang dibentuk oleh lima kelurahan yang definitif, dengan luas wilayah secara administratif adalah 13.341 ha. Adapun kelurahan-kelurahan yang masuk dalam daerah studi adalah Kelurahan Alliritengae, Boribellaya, Pettuadae, Bajubodoa, dan Allepolea.

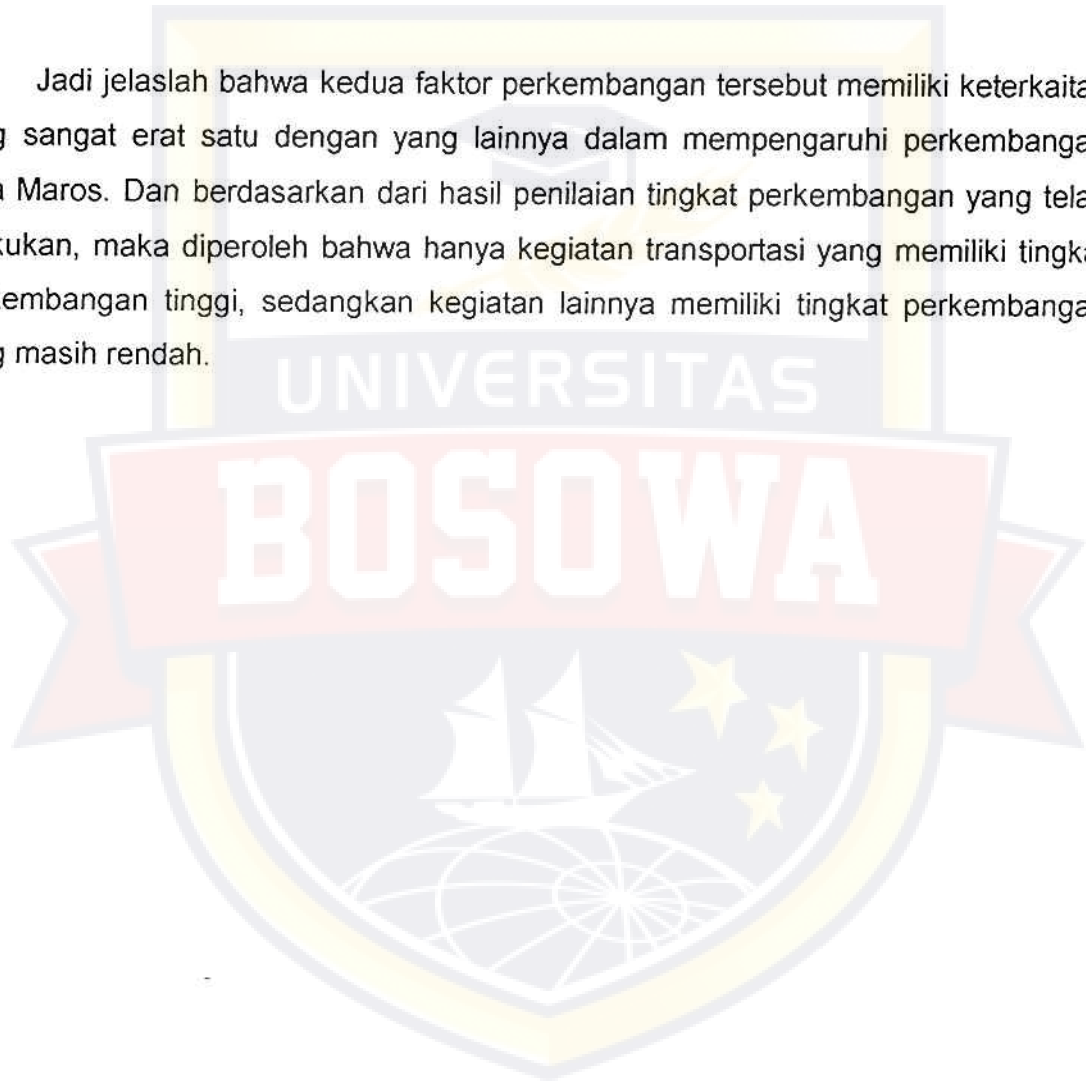
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap gejala-gejala perkembangan yang terjadi di Kota Maros diperoleh masalah-masalah, seperti tingginya laju pertumbuhan penduduk per tahun dan pola tata guna lahan yang tidak efektif dan efisien, sehingga menimbulkan terjadinya pemusatan berbagai kegiatan fungsional pada daerah-daerah tertentu.

Dalam upaya mengatasi masalah-masalah perkembangan yang terjadi di Kota Maros, maka tujuan dari studi ini adalah menentukan terlebih dahulu faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap perkembangan kota, dan kemudian selanjutnya mengetahui seberapa besar potensi penduduk dan kegiatan-kegiatan fungsional kota dalam mempengaruhi perkembangan Kota Maros.

Setelah melalui tahap-tahap penelitian dan penilaian, maka diperoleh bahwa kegiatan-kegiatan fungsional di Kota Maros sangat berperan dalam menentukan pertumbuhan dan pemusatan penduduk. Demikian pula sebaliknya, perkembangan

jumlah penduduk membawa konsekwensi terhadap peningkatan kegiatan-kegiatan fungsional di Kota Maros. Kondisi yang demikian ini dapat ditemukan pada Kelurahan Alliritengae, yaitu kelurahan di mana terkonsentrasinya penduduk dan kegiatan-kegiatan fungsional Kota Maros.

Jadi jelaslah bahwa kedua faktor perkembangan tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat satu dengan yang lainnya dalam mempengaruhi perkembangan Kota Maros. Dan berdasarkan dari hasil penilaian tingkat perkembangan yang telah dilakukan, maka diperoleh bahwa hanya kegiatan transportasi yang memiliki tingkat perkembangan tinggi, sedangkan kegiatan lainnya memiliki tingkat perkembangan yang masih rendah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir yang diberi judul "***Studi Faktor-Faktor Perkembangan Kota Maros***" ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu) Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) pada Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar.

Penulis menyadari pula bahwa tugas akhir ini dapat terselesaikan berkat adanya kerjasama, bimbingan, dan pengarahan langsung dari Bapak Ir. H. Ambo Enre BS, MSi, Bapak Drs. H. Abd. Azis Mattola, MSP, dan Bapak Ir. Burhanuddin, masing-masing selaku pembimbing I, II, dan III. Untuk semua itu, penulis menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Pada kesempatan ini pula, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. A. Jaya Sose, SE, MBA., selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Ir. Mursyid Mustafa, MSi., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Ir. Syafri, selaku Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar.
4. Bapak dan Ibu Dosen pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis selama masa-masa perkuliahan.
5. Bapak Ketua Bappeda Kabupaten Maros dan Kepala Kantor Kecamatan Maros Baru beserta staf, atas kerjasama yang diberikan pada tahap pengumpulan data dan informasi yang penulis butuhkan.

6. Khususnya Ayahanda (Alm.) dan Ibunda (Alm.) tercinta, serta Kakanda Irianto Santoso, Sri Astuti, L. Susanto beserta keluarga, yang telah banyak memberikan motivasi dan do'a restu, baik selama penulis masih dibangku perkuliahan, maupun sampai perampungan tugas akhir ini.
7. Sahabat-sahabat Studio 29 B Makassar dan Keluarga Besar Studio L.6 Makassar, Khususnya Ir. Adhi beserta keluarga, Ir. Syakir B., Ir. Uchal MSP., Ir. Odhi, Ir. Edho, Ir. Fe'i, Ir. Momon, Ir. Taju, Ir Wawan, Ir. Tahir, Kak Onhi, SE., Adhe, Bapak Ir. H. Fitrial Yasin, Ir. Taslim, Ir. Kamil, Ir. Toman, Iphul, Masri, Madhy, Zakar, Amin, Edho, Ir. Rahma, Ir. Kurni, dan rekan-rekan utamanya Ir. Iin, Irma, S.Sos., Syamsi, SH., Lela, SE., Ros, S.Sos., Ir. Emi, Ir. Una, dan Emiyanti, yang telah banyak memberikan ulasan, fasilitas, dan dorongan semangat pada penulis selama perampungan tugas akhir ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat pahala dan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT., serta selalu dalam bimbingan dan lindungan-Nya.

Akhir kata, dengan segenap kerendahan hati, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak **Amin.**

Makassar, Juni 2001

Sugeng Prestiharyono

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-2
1.2 Rumusan Masalah.....	I-6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Studi.....	I-6
1.4 Ruang Lingkup Studi	I-7
1.5 Metode Penelitian	I-7
A. Peninjauan Wilayah Studi.....	I-7
B. Penentuan Unit Penelitian	I-8
C. Penilaian Tingkat Perkembangan	I-8
1.6 Sistematika Pembahasan.....	I-9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Batasan dan Pengertian	II-1
A. Pembangunan	II-1
B. Perkembangan	II-1
C. Kota.....	II-1
2.2 Fungsi Ruang Kota	II-4
A. Fungsi Kota.....	II-5
B. Peranan Kota	II-5



2.3	Pola Penggunaan Lahan di Perkotaan	II-7
2.4	Bentuk dan Pola Perkembangan Kota	II-8
2.5	Konsep Teoritis Perkembangan Kota	II-10
2.6	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kota.....	II-13

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA MAROS

3.1	Konstelasi Kabupaten Maros Terhadap Sulawesi Selatan	
3.1.1	Kebijaksanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	III-1
	A. Kebijakan Spasial.....	III-2
	B. Pembangunan Sektoral.....	III-4
3.2	Kebijaksanaan Pembangunan Kabupaten Maros.....	III-5
3.2.1.	Kebijaksanaan Spasial	III-5
3.2.2.	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros	III-6
3.3	Fungsi dan Peranan Kota Maros	III-10
3.4	Kondisi Fisik.....	III-11
3.4.1	Kondisi Fisik Dasar	III-12
	A. Luas dan Batas Administrasi.....	III-12
	B. Topografi	III-14
	C. Jenis Tanah	III-14
	D. Iklim dan Hidrologi.....	III-14
3.4.2	Kondisi Fisik Artifisial.....	III-14
	A. Perkembangan Kawasan Terbangun.....	III-14
	B. Perkembangan Penggunaan Lahan.....	III-15
	C. Kecenderungan Arah Perkembangan Perumahan	III-16

3.5	Kependudukan.....	III-20
3.5.1	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.....	III-20
3.5.2	Penyebaran dan Kepadatan Penduduk.....	III-21
3.5.3	Struktur Umur Penduduk.....	III-22
3.5.4	Matapencaharian Penduduk.....	III-24
3.5.5	Sosial Budaya Penduduk.....	III-26
3.6	Kegiatan Sosial-Ekonomi.....	III-27
3.6.1	Pendidikan.....	III-27
3.6.2	Perdagangan.....	III-28
3.6.3	Industri.....	III-29
3.6.4	Pertanian.....	III-30
3.7	Sistem Transportasi.....	III-31
3.7.1	Prasarana dan Sarana Transportasi.....	III-31
3.7.2	Pola Pergerakan Dalam dan Keluar Kota.....	III-33

BAB IV FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGAN KOTA MAROS

4.1	Penentuan Unit Penelitian.....	IV-2
4.2	Penelitian Faktor-Faktor Perkembangan.....	IV-2
4.2.1	Penentuan Variabel-Variabel Perkembangan Kota Maros.....	IV-3
4.2.2	Metode Penilaian Faktor-Faktor Perkembangan Kota Maros.....	IV-8
4.3	Analisis Tingkat Perkembangan.....	IV-10
4.3.1	Kegiatan Perumahan.....	IV-10
4.3.2	Kegiatan Pendidikan.....	IV-12
4.3.3	Kegiatan Perdagangan.....	IV-18
4.3.4	Kegiatan Industri.....	IV-19



4.3.5. Kegiatan Pertanian.....	IV-20
4.3.6. Transportasi.....	IV-22

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	V-1
5.2. Saran-Saran	V-2

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Teks	Hal.
Tabel 1.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Maros Tahun 1988-1998.....	I-3
Tabel 3.1	Penggunaan Lahan di Kota Maros 1996 dan 1998....	III-17
Tabel 3.2	Jumlah Rumah di Kota Maros Tahun 1998.....	III-20
Tabel 3.3	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Maros Tahun 1988-1998.....	III-21
Tabel 3.4	Penyebarandan Kepadatan Penduduk Kota Maros Per Kelurahan Tahun 1998.....	III-22
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur di Kota Maros Per Kelurahan Tahun 1998.....	III-24
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kota Maros Per Kelurahan Tahun 1998.....	III-25
Tabel 3.7	Fasilitas Pendidikan di Kota Maros Per Kelurahan Tahun 1998.....	III-28
Tabel 3.8	Fasilitas Perdagangan di Kota Maros Per Kelurahan Tahun 1998.....	III-28
Tabel 3.9	Jenis Industri dan Jumlah Tenaga Kerja di Kota Maros Per Kelurahan Tahun 1998.....	III-29
Tabel 3.10	Jenis Tanaman, Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Tanaman Pertanian di Kota Maros Tahun 1998.....	III-30
Tabel 3.11	Keadaan Prasarana Transportasi di Kota Maros Per Kelurahan Tahun 1998.....	III-32
Tabel 3.12	Keadaan Sarana Transportasi di Kota Maros Per Kelurahan Tahun 1998.....	III-33

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Teks	Hal.
Gambar 1.1	Peta Orientasi Daerah Studi.....	I-5
Gambar 2.1	Bentuk-Bentuk Pola Kota.....	II-11
Gambar 3.1	Peta Administrasi.....	III-13
Gambar 3.2	Pola Penggunaan Lahan Tahun 1998.....	III-18
Gambar 3.3	Peta Penyebaran Fasilitas Tahun 1998.....	III-19
Gambar 3.4	Peta Kepadatan Penduduk Tahun 1998.....	III-23
Gambar 3.5	Peta Kuantitas Angkutan Umum Dari Kota Maros Tahun 1998.....	III-34



BAB I PENDAHULUAN

Memasuki periode pertama Pembangunan Jangka Panjang Tahap II telah dapat dirasakan bahwa usaha pembangunan telah membawa perkembangan di daerah maupun di kota. Pembangunan daerah perkotaan telah memberikan peranan yang sangat besar terhadap perkembangan kota.

Walaupun demikian, usaha-usaha pembangunan tersebut belum seluruhnya berhasil dan dapat dirasakan masyarakat pada umumnya, tetapi manfaatnya sudah menunjukkan ke arah pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (Hadiwinoto, 1981: 33).

Adanya perubahan-perubahan ini juga bergantung sepenuhnya kepada sikap masyarakat itu sendiri yang merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan yang ada di dalamnya. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan dengan adanya proses perubahan yang mengarah kepada perbaikan dalam tingkat kesejahteraan hidup masyarakatnya merupakan gejala-gejala suatu perkembangan (Hajisaroso, 1980: 23).

Perkembangan itu sendiri baik langsung, maupun tidak langsung merupakan produk dari kegiatan pembangunan. Dalam bentuk yang nyata, perkembangan kota dicirikan oleh meningkatnya kebutuhan akan perumahan, fasilitas pelayanan, dan lain-lain. Sehingga dapat mempengaruhi pola tata guna lahan sebagai akibat dari perubahan kegiatan yang berada di atasnya.

Menurut Chapin (1957: 22), proses perubahan lingkungan ini berlangsung berdasarkan fungsi dari masyarakat kota, waktu, dan ruang. Sehingga dapatlah dimengerti bahwa perkembangan kota terlihat dari perubahan wadah yang

merupakan tempat bagi kehidupan manusia dalam usaha mencapai kesejahteraannya (Hadiwinoto, 1981: 33). Kesejahteraan di sini dalam arti pemenuhan keberadaan dan ekonomi, serta pemuasan kebutuhan kejiwaan dalam pengembangan sosial budayanya sebagai manusia yang berakal budi. Dari pengertian ini, bagaimanapun perkembangan suatu kota akan mengikutsertakan penduduk yang bersangkutan.

1.1 Latar Belakang

Bersumber dari telaah literatur yang telah dilakukan, diperoleh bahwa perkembangan suatu kota pada hakekatnya sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor penduduk dan faktor kegiatan fungsional masyarakatnya (Sujarto, 1980: 1). Pernyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian Gould, Adams, and Abler (1972: 354), yang menyatakan bahwa perkembangan kota tergantung kepada hubungan manusia dan kegiatan fungsionalnya. Jadi kedua faktor utama tersebut tidak dapat dipisahkan dalam suatu kehidupan perkotaan karena mempunyai hubungan yang saling kait mengkait satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dalam studi ini akan ditentukan faktor-faktor yang akan dinilai perkembangannya. Faktor-faktor tersebut adalah penduduk dan kegiatan fungsional kota. Kedua faktor inilah yang akan ditinjau hubungan dan potensinya dalam mempengaruhi perkembangan kota.

Untuk maksud tersebut, maka daerah penelitian yang akan diteliti dalam studi ini adalah Kota Maros (Ibukota Kabupaten Maros). Dipilihnya Kota Maros sebagai studi kasus, karena Kota Maros termasuk salah satu ibukota kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Suatu kota dapat dikatakan cepat perkembangannya apabila pertumbuhan penduduk memperlihatkan perlonjakan yang tinggi (Sujarto, 1976: 6).

Kota Maros, menurut data yang diperoleh, memperlihatkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi setiap tahunnya, yaitu rata-rata 3,06 persen per tahun (Tabel 1.1). Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, yaitu di atas dua persen per tahun, di masa-masa mendatang akan menjadi beban yang berat bagi daya dukung suatu wilayah/daerah. Bahkan tidak mustahil jika terjadi upaya perluasan wilayah kotanya, baik untuk kepentingan penyediaan lahan perumahan maupun untuk sarana dan prasarana kotanya agar kehidupan perkotaan terus berlanjut.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Maros
Tahun 1988 – 1998

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertambahan (%)
1	1988	35.851	3,02
2	1989	36.934	3,03
3	1990	38.054	3,05
4	1991	39.213	3,06
5	1992	40.411	3,06
6	1993	41.469	3,06
7	1994	42.932	3,08
8	1995	44.233	3,03
9	1996	45.633	3,17
10	1997	47.020	3,04
11	1998	48.464	

Sumber : - *Potensi Desa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.*

- *Hasil Perhitungan.*

Selain itu perkembangan Kota Maros tidak hanya disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi saja akan tetapi disebabkan pula oleh fungsi dan peranan kota yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan suatu kota merupakan lingkungan yang baik bagi kegiatan ekonomi masyarakatnya (Anonim, 1974: 29).

Di samping hal-hal yang telah disebutkan di atas, apabila ditinjau dari faktor letak geografisnya, Kota Maros terletak pada posisi yang strategis, sebab berada pada jalur lintas jalan regional yang dapat menghubungkan Kota Maros dengan kota-kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Letak Kota Maros yang strategis ini, merupakan jalur ekonomi yang kuat, karena jalur jalan ini digunakan sebagai jalur pengangkutan hasil-hasil produksi daerah dari sebagian besar kota-kota yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan adanya interaksi antar kota-kota tersebut, dapat memberikan peluang bagi Kota Maros untuk berkembang lebih pesat, karena dengan adanya lintas jalan regional, dapat menimbulkan pusat-pusat aktifitas baru yang menyebar mengikuti jalur jalan tersebut, dan akan memberikan pengaruh yang positif ke arah peningkatan produktifitas. Hal ini juga besar artinya bagi peningkatan pendapatan asli daerah, maka kedudukan Kota Maros ini sangat menguntungkan. Untuk lebih jelasnya, posisi Kota Maros (daerah studi) dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Dengan melihat gejala-gejala perkembangan yang terjadi di Kota Maros, memungkinkan timbulnya berbagai persoalan, antara lain:

- Semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk per tahun.
- Pola tata guna lahan yang tidak efektif dan efisien sehingga menimbulkan terjadinya pemusatan berbagai kegiatan fungsional pada tempat-tempat tertentu.








Pada akhirnya masalah perkembangan Kota Maros tidak terlepas dari adanya faktor-faktor perkembangan yang merupakan bentuk-bentuk kekuatan yang mendorong terjadinya perkembangan lebih lanjut.

**STUDI IDENTIFIKASI
FAKTOR FAKTOR PERKEMBANGAN
KOTA MAROS**

Gambar : 1.1

PETA ORIENTASI DAERAH STUDI

KETERANGAN

-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Ibukota Kabupaten
-  Ibukota Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai
-  DAERAH STUDI

MAHASISWA / NO. POKOK

SUGENO PRESTHARYONO

45 86 04 0361 / 87 113 4505

DOSEN PEMBIMBING

PARAF

Ir. H. AMBO ENRE BS, M3I

Dra. ABD. AZIS MATTOLA, M3P

Ir. BURHANUDDIN BADRUN

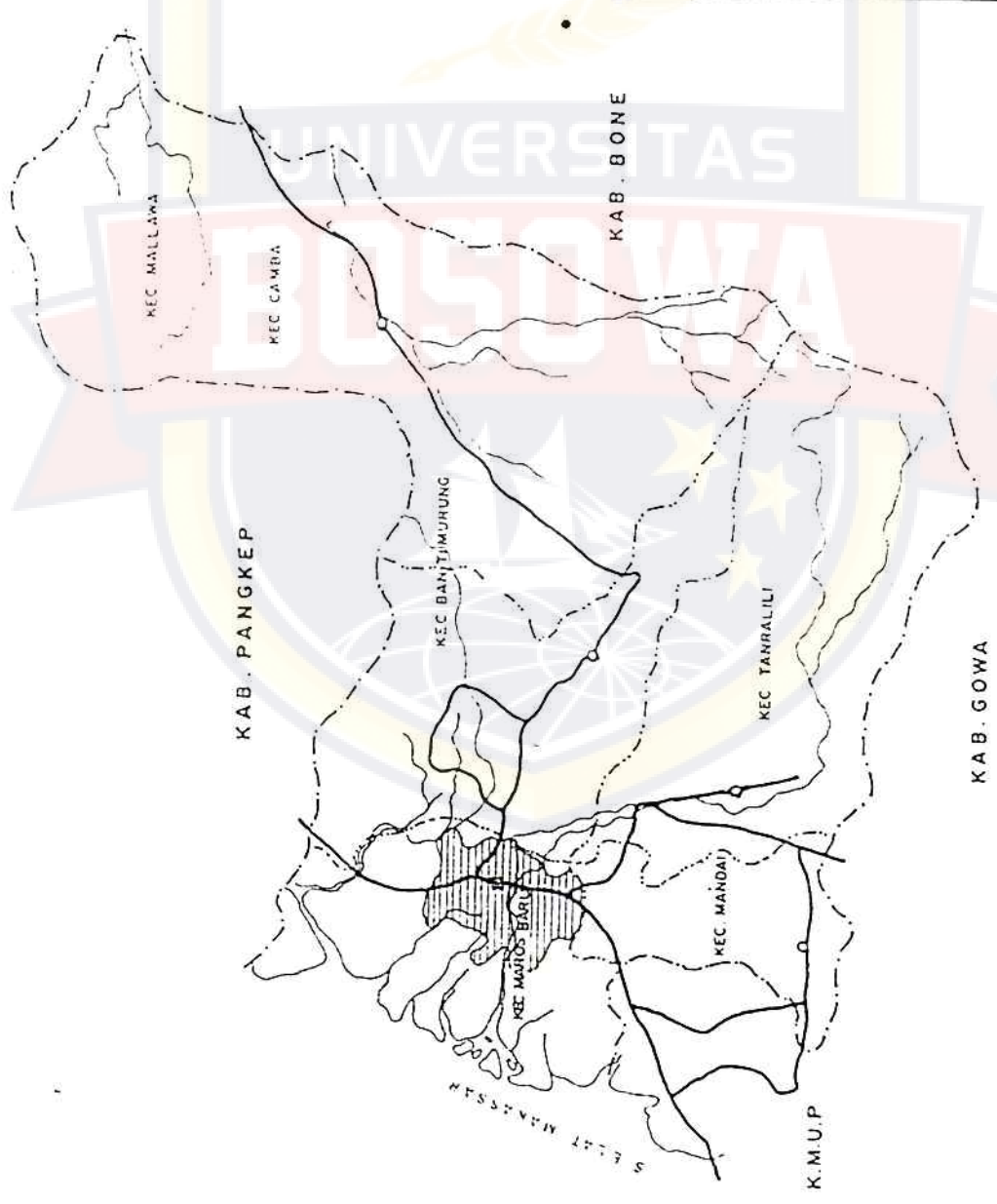


SKALA 1 : 300.000

Sumber : - RUTRK Maros



**JURUSAN PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45"**





1.2 Rumusan Masalah

Bertitiktolak dari berbagai persoalan yang terjadi di Kota Maros, maka dirumuskan permasalahan sebagai pangkaltolak dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh penduduk dan kegiatan fungsional kota dalam mempengaruhi perkembangan Kota Maros.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Studi

Adapun tujuan dari studi ini adalah:

- 1) Menentukan faktor-faktor utama perkembangan kota sebagai faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan Kota Maros.
- 2) Mengetahui seberapa besar tingkat potensi penduduk dan kegiatan fungsional kota dalam mempengaruhi perkembangan Kota Maros.

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh, maka studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai:

- 1) Bahan pertimbangan dan masukan dasar untuk para penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan bagi usaha pemanfaatan ruang/lahan di Kota Maros sehingga perkembangan kotanya lebih terarah dan terkendali.
- 2) Bahan referensi bagi ilmuwan dan mahasiswa untuk studi lanjutan.

1.4 Ruang Lingkup Studi

Dalam penelitian ini, lingkup studi dibatasi hanya pada faktor-faktor perkembangan kota yang bersumber dari dalam Kota Maros itu sendiri (faktor internal), yaitu penduduk dan kegiatan fungsionalnya. Dari faktor-faktor inilah yang akan dinilai sehingga diperoleh variabel-variabel sebagai faktor utama yang berpengaruh terhadap perkembangan Kota Maros.

Agar tujuan studi ini dapat tercapai, unit penelitian dibatasi pada aspek fisik, sosial dan ekonomi, karena ketiga aspek ini merupakan potensial sebagai penentu dan sekaligus berpengaruh terhadap perkembangan kota.

Sedangkan daerah penelitian adalah dibatasi pada wilayah administrasi kelurahan yang merupakan unit terkecil basis data pemerintahan Kota Maros, yaitu batas administrasi Kota Maros yang meliputi lima kelurahan definitif. Batasan-batasan tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam pengumpulan dan pengolahan data, sebab pada kenyataannya bahwa data yang tersedia biasanya terorganisasi menurut wilayah administrasi (Antaprawira, 1976: 12).

1.5 Metode Penelitian

Secara metodologis, pendekatan yang akan dikembangkan dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

A. Peninjauan Wilayah Studi

Langkah pertama yang dilakukan dalam studi ini adalah mengenali kondisi Kota Maros, dengan maksud untuk mengetahui masalah dan potensi maupun tingkat perkembangan dari setiap kelurahan. Untuk itu perkembangan struktur sosial dan ekonomi pengamatannya dilakukan berdasarkan aspek kependudukan dan ruang/tempat berlangsungnya kegiatan penduduk Kota Maros.

B. Penentuan Unit Penelitian

Dalam menentukan faktor-faktor perkembangan yang akan dijadikan unit penelitian didasarkan kepada kegiatan fungsional Kota Maros. Dari penentuan ini diharapkan akan ditemukan kegiatan fungsional yang berpengaruh terhadap perkembangan Kota Maros. Untuk mencapai maksud tersebut, digunakan pendekatan terhadap enam kegiatan fungsional yang dipandang dapat mewakili dari keseluruhan kegiatan fungsional yang sedang berlangsung di Kota Maros, dan memiliki peranan yang lebih dominan dalam mempengaruhi perkembangan kotanya.

C. Penilaian Tingkat Perkembangan

Dalam menentukan tingkat perkembangan, penilaiannya didasarkan kepada hubungan penduduk dengan kegiatan fungsionalnya. Hubungan tersebut dituangkan

dalam variabel-variabel yang merupakan indikator bagi terbentuknya faktor-faktor perkembangan. Sedangkan cara penilaiannya adalah dengan menggunakan metode pembobotan sederhana, yaitu metode indeks (Dajan, 1978: 215).

Metode indeks adalah merupakan suatu peralatan statistik yang populer guna mengukur perubahan atau melakukan perbandingan antara variabel-variabel ekonomi sosial. Di samping itu, penggunaan metode ini mempunyai kemampuan dapat merubah harga satuan setiap variabel menjadi hilang dan mempunyai skala yang sama untuk semua variabel yang dinilai. Adapun cara kerja metode ini akan diuraikan secara lengkap pada bab selanjutnya (Bab IV).

Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut di atas, kemudian ditentukan faktor-faktor perkembangan Kota Maros yang akan dianalisis lebih lanjut.

1.6 Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, isi dari studi ini adalah:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan studi, ruang lingkup studi, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini berisikan tentang studi literatur yang mendukung tercapainya tujuan studi, meliputi batasan dan pengertian, serta teori-teori yang berhubungan erat terhadap perkembangan kota.

Bab III Gambaran Umum Kota Maros

Pada bagian ini akan dibahas tentang karakteristik Kota Maros yang meliputi aspek fisik, sosial dan ekonomi, serta potensi dan permasalahan yang terdapat di Kota Maros.

Bab IV Faktor-Faktor Perkembangan Kota Maros

Pada bagian ini berisi tentang dasar pertimbangan penentuan faktor-faktor perkembangan Kota Maros. Selanjutnya adalah penelitian terhadap faktor-faktor tersebut. Sehingga akan diperoleh variabel-variabel setiap faktor-faktor perkembangan Kota Maros.

Bab V Penutup

Bagian ini adalah merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil pembahasan dan tinjauan sebelumnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Batasan dan Pengertian

A. Pembangunan

Menurut Jayadinata (1986), pembangunan adalah mengadakan atau membuat dan mengatur sesuatu yang belum ada.

Sedangkan pembangunan menurut Tjokroamidjoyo (1980) menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses dinamis. Dan pembangunan adalah suatu usaha ke arah tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Katz dalam Syamsi (1986) merumuskan pembangunan sebagai perubahan yang terencana dari situasi yang dinilai lebih tinggi.

B. Perkembangan

Perkembangan adalah memajukan atau meningkatkan sesuatu menjadi lebih dari yang sudah ada (Anonim, 1989). Berdasarkan pengertian-pengertian ini, maka pembangunan dan perkembangan adalah merupakan suatu proses yang dinamis dengan menggunakan segala sumber daya yang tersedia guna mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

C. Kota

Untuk membuat suatu batasan atau definisi mengenai kota, tidaklah mudah. Ternyata masih ada beberapa pandangan definisi yang belum dapat disatukan, dan dalam memberikan definisi tentang kota, maka para ahli mengajukan beberapa aspek yang akan mendasarinya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Hoekveld dalam Daldjuni (1987) memberikan batasan sebagai berikut:

a. Morfologi

Masalah pokoknya adalah perbandingan bentuk fisik kota dengan fisik pedesaan, karena di kota umumnya terlihat dengan gedung-gedung besar, tinggi yang saling berdekatan, sedangkan di desa berupa rumah-rumah yang tersebar dalam lingkungan alam wajar yang fisis-biotis.

b. Hukum

Pengertian kota di sini dikaitkan dengan hak-hak hukum tersendiri bagi penghuni kotanya. Seperti kota-kota Salatiga, Sukabumi, Probolinggo di Jaman Hindia Belanda berstatus Haminte (Gemeente) karena penduduknya yang berbangsa Eropa sebanyak 10 % lebih, sehingga menurut hukum yang berlaku kotanya ditempatkan di bawah kekuasaan Burgemeester (walikota) dan tidak di bawah kekuasaan bupati.

c. Sosial

Hubungan-hubungan antara penduduknya secara sosial disebut impersonal. Mereka hidup berkotak-kotak atau kepentingan yang berbeda-beda dan bebas memilih hubungan dengan siapa saja yang diinginkan.

d. Ekonomi

Ciri kota adalah hidup yang non agraris. Fungsi khasnya lebih kultural, industri, dan perdagangan. Dan dari kesemuanya itu yang lebih menonjol adalah ekonomi perniagaan.

Selanjutnya Bintarto dalam Daldjuni (1987) memberikan definisi lain tentang pengertian kota, sebagai berikut:

- Dari segi geografi, kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai oleh kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya materialistis.
- Kota dapat diartikan sebagai benteng budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang sifatnya heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah hinterlandnya.

Di samping itu Louis Wirth dalam Daldjuni (1987) merumuskan bahwa "kota adalah suatu *settlement* yang relatif besar, padat, dan permanen dari pada suatu kumpulan individu yang mempunyai sifat sosial yang heterogen".

Kemudian Hofmeister dalam Daldjuni (1987) memberikan definisi dalam arti yang luas, yaitu bahwa kota adalah suatu pemusatan keruangan dari tempat tinggal dan tempat kerja manusia yang umumnya di sektor sekunder dan tertier, dengan pembagian kerja ke dalam dan arus lalu lintas yang beraneka antara bagian-bagian dan pusatnya, yang pertumbuhannya sebagian besar disebabkan oleh tambahan kaum pendatang dan mampu melayani kebutuhan barang dan jasa bagi wilayah yang jauh letaknya.

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa unsur-unsur yang tercakup di dalamnya adalah:

- Adanya suatu jaringan hidup atau kegiatan penduduk.
- Adanya batas administrasi yang diatur oleh perundang-undangan.
- Adanya pusat permukiman penduduk yang sifatnya permanen.
- Adanya jumlah penduduk yang cukup tinggi, serta
- Adanya sifat materialistis yang cukup besar dikalangan penduduknya.

2.2 Fungsi Ruang Kota

Ruang-ruang dalam suatu kota pada dasarnya terbagi atas dua fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi internal, yaitu berupa fungsi kota sebagai urusan rumah tangga atau administrasi.
2. Fungsi eksternal, yaitu fungsinya sebagai pendorong dan pemberi pelayanan bagi daerah sekitarnya.

Wilayah pengaruh atau wilayah belakang (*hinterland*) suatu kota adalah wilayah pedesaan atau kota atau kawasan yang berada dalam jangkauan pelayanan suatu kota. Hal ini berarti bahwa pedesaan atau perkotaan tersebut berada dalam *hinterland* suatu kota utamanya merupakan bagian wilayah kota yang langsung dipengaruhi oleh kota tersebut dalam memberikan pelayanannya.

Fungsi eksternal kota terbagi dalam beberapa fungsi, antara lain:

- Merupakan pusat pemasaran bagi bermacam-macam barang yang dihasilkan oleh masyarakat untuk mengolah potensi sumber daya alam.
- Sebagai terminal jasa distribusi agar pusat produksi dapat menjangkau pasaran yang lebih luas, sehingga harus dilayani dengan jasa distribusi yang lengkap, yaitu dalam bentuk jaringan jalan, fasilitas angkutan, terminal, pasar, dan lain-lain.
- Memberikan pelayanan dalam bentuk fasilitas ekonomi yang diperlukan bagi peningkatan produksi.
- Memberi pelayanan dalam bentuk jasa ekonomi lainnya, seperti fasilitas perbankan, komunikasi, dan lainnya yang mendorong terciptanya kegiatan usaha dalam masyarakat.

- Sebagai pusat pendorong bagi kegiatan modernisasi dan perubahan dalam bentuk fasilitas ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, dan lain-lain.
- Merupakan pusat pelayanan sosial seperti, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, rekreasi, administrasi, pemerintahan, dan lainnya.

A. Fungsi Kota

Suatu ibukota mempunyai fungsi yang sangat kompleks (Mc. Gee, 1976: 29), artinya dapat berupa pusat administrasi pemerintahan, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan sosial dan budaya.

Uraian di atas menggambarkan bahwa suatu ibukota memiliki kesamaan dalam fungsinya, yaitu sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam daerah wewenangnya maupun daerah sekitarnya yang mempunyai akses yang baik pada suatu kota.

B. Peranan Kota

Demikian pula halnya dengan peranan suatu kota, seperti yang dikemukakan oleh P. Geddes dalam Watts (1976: 8-10), bahwa ada empat unsur dasar bagi penyelidikan peran suatu kota, yaitu unsur penduduk, tempat, pekerjaan, dan transportasi, seperti yang diuraikan di bawah ini:

1. Penduduk

Suatu kota bukanlah sekelompok gedung-gedung, tetapi tempat di mana manusia melangsungkan kehidupannya. Jadi pengetahuan mengenai penduduk yang hidup di kota adalah suatu konsekwensi yang tidak bisa ditinggalkan dari keseluruhan proses perkembangan kota. Pengetahuan itu meliputi perkembangan penduduk dan kebutuhan pelayanan sosial ekonomi. Semakin besar jumlah penduduk semakin besar pula tuntutan kebutuhan tersebut.

2. Tempat

Dari segi hukum formal suatu kota dicirikan berdasarkan batas administrasinya yang merupakan suatu tempat kehidupan kegiatan perkotaan berlangsung serta menyangkut segi penggunaan lahan latar belakang fisik dan persoalan-persoalan agraria.

3. Pekerjaan

Perkembangan penduduk bukan saja merupakan masalah yang dihadapi dalam suatu kota, tapi bila dipandang dari sudut lain penduduk adalah potensi perkembangan kota sebagai sumber daya manusia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan sehingga dengan bekerja penduduk kota dapat memperoleh pendapatan. Dengan pendapatan tersebut penduduk akan sanggup membangun kotanya di samping akan menolong diri mereka sendiri.

4. Transportasi

Peranan transportasi dalam perkembangan kota tidak dapat dipisahkan dari permasalahan tata guna lahan yang bersangkutan. Akan tetapi transportasi dapat merubah sifat-sifat hubungan antara ruang dan waktu, artinya dalam proses pembentukan suatu kegiatan penduduk banyak memanfaatkan jaringan jalan yang ada. Lambat laun karena terus meningkatnya kebutuhan akan sarana transportasi berarti akan meningkat pula volume lalu lintas yang melewati jaringan jalan tersebut dan mengakibatkan semakin kuatnya peranan jaringan itu.

Dari uraian-uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa peranan keempat unsur dasar dalam kehidupan suatu kota sangat besar artinya dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Penduduk memerlukan tempat, pekerjaan,

dan transportasi, sedangkan tempat merupakan kebutuhan di mana kita dapat melakukan pekerjaan dan perhubungan untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, demikian pula halnya pekerjaan dibutuhkan oleh penduduk dalam memenuhi kegiatan ekonominya.

2.3 Pola Penggunaan Lahan di Perkotaan

Pada hakekatnya, kota dapat dilihat sebagai suatu area geografis di mana di dalamnya terdapat pengelompokan penduduk dan kegiatan non pertanian. Bila ditinjau dalam ruang lingkup yang lebih luas kota dapat dilihat sebagai pusat atau titik simpul jasa distribusi, yang mempunyai peranan yang sangat berarti di dalam menciptakan pertumbuhan perkembangan wilayah.

Di dalam upaya memahami pola penggunaan lahan diperkotaan maka ada beberapa teori yang dikemukakan oleh ahli perkotaan yang menjadi dasar uraian mengapa di dalam kota terdapat kegiatan tertentu, dan mengapa daerah yang satu berkembang begitu pesat, sedangkan daerah lainnya lambat perkembangannya.

Salah satu teori yang dikemukakan oleh Friedman adalah teori inti (*core region*) dalam Adisasmita (1987), melihat bahwa suatu negara terdiri dari satu atau lebih sektor yang disebut sebagai pusat (*central*) dan lainnya sebagai pinggiran (*periphery*). Dalam teori ini Friedman mengambil aspek-aspek tentang ruang, lokasi, serta persoalan-persoalan kebijaksanaan dan perencanaan pengembangan wilayah dalam ruang lingkup yang lebih general dengan menampilkan teori inti ini. Pada umumnya daerah-daerah inti melaksanakan fungsi pelayanan daerah-daerah di sekitarnya.

Friedman menganggap bahwa daerah inti sebagai pusat pelayanan dan pusat pengembangan adalah suatu hal yang penting untuk diperhatikan.

Pada pusat-pusat urban, peranan yang dominan adalah memberikan pancaran pengembangan ke wilayah-wilayah di sekitarnya, di mana daerah inti mempunyai daya pengikat yang kuat untuk mewujudkan spasial sistem sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa.

2.4 Bentuk dan Pola Perkembangan Kota

Setiap kota mempunyai bentuk tersendiri dan akan berkembang menurut pola-pola tertentu yang sesuai dengan bentuk kota tersebut.

Di dalam perencanaan suatu kota, bentuk-bentuk dan pola perkembangan suatu kota sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain; kondisi alam, kondisi sosial-ekonomi, tingkat teknologi, dan warisan-warisan masa lampau.

Djalante (1987) dalam Pabesak (1989) mengemukakan beberapa bentuk perkembangan kota, seperti yang dijabarkan di bawah ini:

1. Radiocentris

Adalah bentuk kota yang menyerupai bentuk suatu lingkungan yang besar dan luas dengan sistem perkembangan merata keluar dari pusat kota yang terletak di tengah-tengah, sedangkan sistem transportasinya mengikuti perkembangan kota yang membentuk jari-jari lingkaran kota itu, di mana jalan-jalan penghubung berbentuk lingkaran sesuai dengan pola kota tersebut.

2. Rectalinier

Adalah bentuk kota yang menyerupai segi empat panjang. Pada umumnya bentuk pola kota semacam ini terletak di dataran pantai di mana jalan-jalannya datar dan lurus serta saling berpotongan secara teratur.

3. Star

Adalah bentuk kota yang menyerupai bentuk bintang dan hampir menyerupai bentuk pola *radiocentris*. Demikian juga perkembangannya memancar keluar dari pusat kota yang terletak di tengah-tengah kota itu. Jaringan jalannya mengikuti perkembangan kota tersebut yang menyerupai bintang, dan sistem aliran kegiatan-kegiatan kehidupan kota akan terorganisir pada radial yang sama.

4. Ring

Adalah bentuk kota yang menyerupai seri cincin bulat melingkar. Pusat kota berada pada daerah di dalam lingkaran itu dan kepadatan-kepadatan tinggi serta aktifitas-aktifitas khusus mengelilinginya seperti suatu lingkaran roda.

5. Linier

Adalah bentuk kota yang hampir menyerupai atau mengikuti sepanjang suatu jalan raya, sungai atau lembah yang lurus.

6. Branch

Adalah bentuk kota yang hampir menyerupai bentuk linier hanya mempunyai cabang. Bentuk kota seperti ini biasanya mengikuti suatu cabang anak sungai atau simpang jalan.

7. Sheet

Adalah suatu bentuk kota yang menyerupai sehelai daun tetapi jalur-jalur jalan yang kurang teratur bentuknya sehingga pengaturan sistem transportasi kota agak sulit dilaksanakan.

8. Articulated Sheet

Adalah suatu bentuk kota yang kurang artikulasi dengan beberapa pengelompokan lingkungan yang kurang teratur.

9. Constellation

Adalah suatu bentuk kota yang sistem jaringan jalannya membentuk rangkaian kelompok lingkaran yang hampir sama luasnya dengan bentuk segi tiga yang secara lokal memusat pada masing-masing kelompok.

10. Satelit

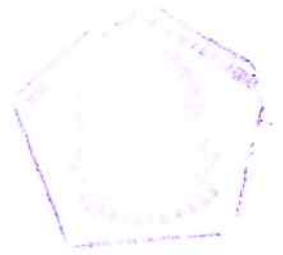
Adalah bentuk kota yang mempunyai anak planet mengelilingi pusat kotanya membentuk rangkaian anak planet.

Untuk lebih jelasnya, bentuk-bentuk kota dapat dilihat pada Gambar 2.1.

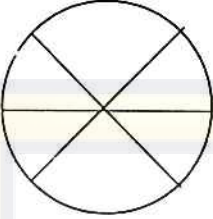
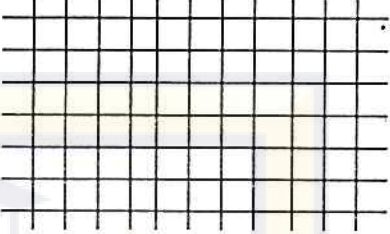
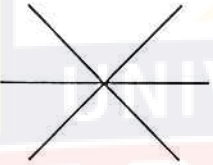
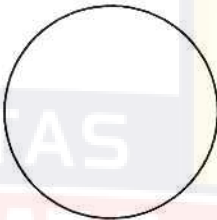
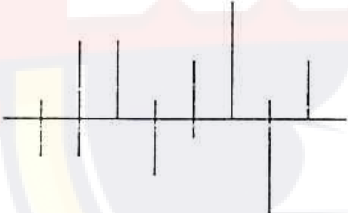
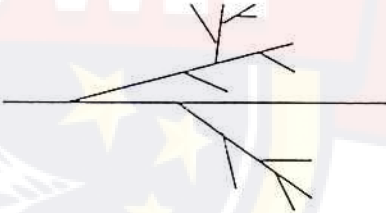
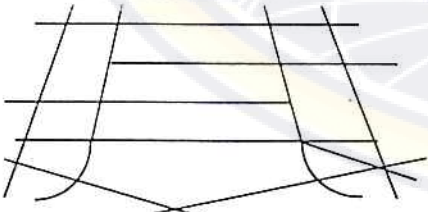
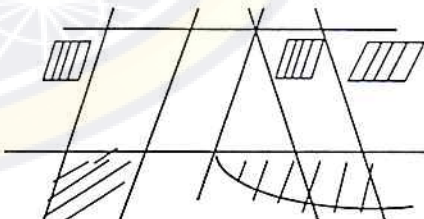
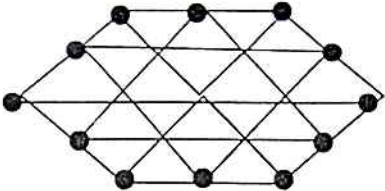
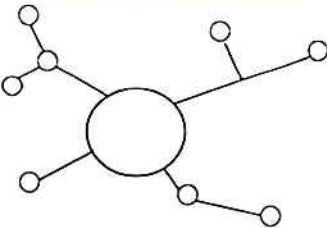
2.5 Konsep Teoritis Perkembangan Kota

Berdasarkan penelitian-penelitian empiris, secara teoritis terdapat beberapa konsep perkembangan kota. Pada umumnya dikemukakan bahwa pola maupun kecenderungan perkembangan kota dapat digambarkan sebagai tiga macam bentuk (Djoko Sujarto, 1976), yaitu:

1. Pola atau kecenderungan perkembangan kota dengan Konsep Konsentrik (memusat). Pola perkembangan ini menyebutkan bahwa kota-kota tidak tumbuh dalam zona-zona konsentrik itu saja, tetapi sektor-sektor dan jenis perkembangan yang serupa, dalam arti daerah-daerah perumahan dapat berkembang keluar sepanjang hubungan-hubungan transportasi yang ada, unsur-unsur topografi, kenikmatan alami atau semacamnya.



Gambar 2.1 Bentuk-Bentuk Pola Kota

RADIOCENTRIS 	RECTALINIER 
STAR 	RING 
LINIER 	BRANCH 
SHEET 	ARTICULATED SHEET 
CONSTELLATION 	SATELITE 

2. Konsep Sektoral (*Sectoral Concept*), di mana pusat utamanya terletak di bagian pusat lingkaran kota, sedangkan perkembangan dari kegiatan fungsional lainnya adalah membentuk sektor dari lingkaran kota tersebut. Dalam situasi pertumbuhan, setiap zona akan menambah yang berdampingan diluarnya dengan suatu efek berantai. Dengan kemunduran, maka zona-zona yang berada di luar akan tetap statis, sedangkan zona transisi menjadi besar dan menjadi zona pusat.
3. Konsep Pusat Jamak atau yang dikatakan *Multiple Nuclei*. Di dalam pola konsepsuil ini, kota dibentuk oleh pusat-pusat kegiatan fungsional kota yang tersebar, masing-masing pusat mempunyai peranan penting di dalam kota. Pusat-pusat tersebut dapat mempunyai fungsi sama, tetapi umumnya fungsi tersebut berlainan dan bahkan saling menunjang satu sama lainnya.

Ketiga konsep ini diteliti dan dikembangkan berdasarkan keadaan di negara-negara industri yang telah maju. Jadi dengan sendirinya komponen-komponen perkotaan juga didasarkan kepada sifat dan motivasi perkembangan masyarakat negara industri yang telah maju. Sekalipun demikian sebagai dasar umum dapat dipegang sebagai pedoman pada peninjauan pola dan kecenderungan perkembangan kota-kota di negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia.

Dengan sendirinya upaya-upaya modifikasi atau penyelesaian dengan kondisi dan situasi serta sifat dan corak kehidupan masyarakat di negara sedang berkembang perlu diperhatikan. Hal ini penting karena pola fisik perkotaan di negara sedang berkembang mencerminkan pula sifat dan pola

masyarakat bangsa, di samping ada pula pengaruh-pengaruh pola perkotaan pada jaman kolonisasi dahulu.

2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kota

Menurut Rustam dan kawan-kawan (1978: 28-29) menyatakan bahwa perkembangan suatu kota dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Perkembangan aspek fisik yang di maksud adalah akibat dari perkembangan sosial ekonomi yang memerlukan sejumlah areal lahan, misalnya:

1. Perkembangan akses, yaitu diwujudkan dengan adanya sarana dan prasarana transportasi, angkutan umum, jaringan jalan, jembatan, terminal, dan lain-lain.
2. Sedangkan kelengkapan fasilitas, yaitu perkembangan yang menuntut penyediaan lahan untuk menampung berbagai kegiatan kota, seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, perkantoran/pemerintahan, perumahan, industri, tempat hiburan, olah raga, dan fasilitas sosial-ekonomi lainnya.

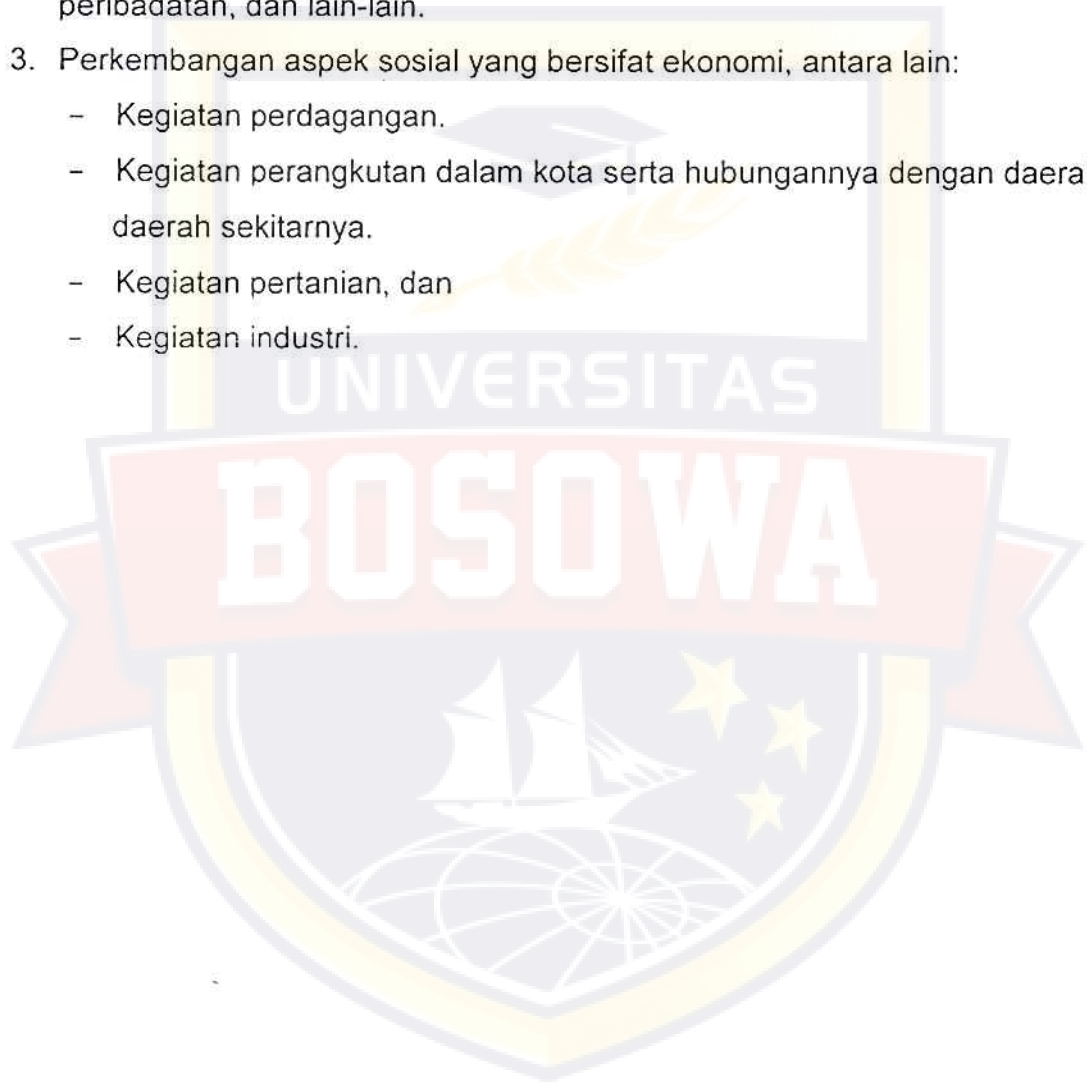
Secara fisik, perkembangan suatu kota dipengaruhi pula oleh:

- Letak geografis wilayah.
- Iklim, hidrologi, dan topografi.
- Sumberdaya alam, seperti sungai, rawa, hutan, dan hasil-hasil pertanian.

Sedangkan perkembangan kota dari aspek sosial-ekonomi yang dimaksud, antara lain:

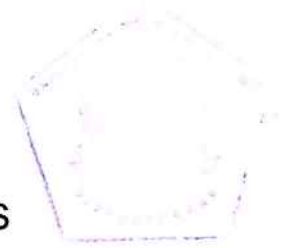
1. Perkembangan penduduk, meliputi:
 - Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk per tahun.
 - Penyebaran dan kepadatan penduduk.
 - Mata pencaharian dan pendapatan per kapita penduduk.

- Struktur umur dan jenis kelamin.
 - Angka kelahiran, kematian, dan migrasi.
2. Perkembangan aspek sosial lainnya dapat dilihat dari perkembangan kegiatan fungsional suatu kota, seperti kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan lain-lain.
 3. Perkembangan aspek sosial yang bersifat ekonomi, antara lain:
 - Kegiatan perdagangan.
 - Kegiatan perangkutan dalam kota serta hubungannya dengan daerah-daerah sekitarnya.
 - Kegiatan pertanian, dan
 - Kegiatan industri.



BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA MAROS



Pembahasan tentang gambaran umum Kota Maros pada bagian ini, dimaksudkan untuk mengungkapkan karakteristik wilayah Kota Maros, baik dari segi fisik, maupun dari segi sosial dan ekonomi, sehingga dapat diketahui potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Kota Maros.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka pengamatannya akan meliputi; konstelasi Kabupaten Maros terhadap Sulawesi Selatan, kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, fungsi dan peranan kota, kondisi fisik, kependudukan, kegiatan sosial-ekonomi, dan sistem transportasi.

Dengan pembahasan-pembahasan tersebut di atas, diharapkan dapat memperlihatkan gambaran ringkas Kota Maros yang akan digunakan untuk proses analisis selanjutnya.

3.1 Konstelasi Kabupaten Maros Terhadap Sulawesi Selatan

3.1.1 Kebijakan Pembangunan Provinsi Dati I Sulawesi Selatan

Secara singkat mengenai kebijaksanaan pembangunan yang akan dan telah dilaksanakan di Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan akan diarahkan pada dua hal utama, yaitu kebijaksanaan spasial dan kebijaksanaan pembangunan daerah mengenai pembangunan sektoral.

A. Kebijakan Spasial

Sebagai salah satu hal yang mendasari Program Perencanaan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan adalah kebijaksanaan (tata ruang) yang ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Untuk dapat melihat laju pertumbuhan ekonomi dan sosial dari setiap wilayah dan untuk dapat menetapkan sasaran pengembangan dan pemerataan pertumbuhan wilayah-wilayah pembangunan dalam Repelita Kelima di wilayah provinsi daerah dirancang pusat-pusat kegiatan ekonomi dan jaringan transportasi/komunikasi akan menentukan efisiensi dan efektifitas keseluruhan kegiatan usaha masyarakat.

Pengwilayahan komoditi sebagai strategi dasar dan tata wilayah dapat dikembangkan dengan menetapkan pusat-pusat/sentra produksi yang diharapkan akan dapat berperan optimal, saling berkaitan dan saling menunjang untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan wilayah secara menyeluruh. Untuk itu ditetapkan beberapa wilayah pembangunan dengan pusat-pusat yang dirintis sebagai berikut:

- a. Wilayah Pembangunan Bagian Selatan dengan pusat pengembangan di Ujungpandang, yang meliputi; Kotamadya Ujungpandang, Kabupaten Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Je'nepono, Bantaeng, Bulukumba, dan Selayar.

Pada wilayah pembangunan ini akan dikembangkan kegiatan usaha yang meliputi; tanaman pertanian/perkebunan kapas, buah-buahan, tebu, jambu mente; peternakan (ternak kecil), perikanan, pertambakan; industri (agroindustri, aneka industri, dan industri dasar); perdagangan, pengangkutan, dan perbankan.

- b. Wilayah Pembangunan Bagian Tengah dengan pusat pengembangan di Parepare, yang meliputi; Kotamadya Parepare, Kabupaten Barru, Pinrang, Sidrap, dan Enrekang.
- Kegiatan usaha yang akan dikembangkan pada wilayah pembangunan ini meliputi; padi, hortikultura, kopi; peternakan, perikanan; industri kecil dan menengah; perdagangan, pengangkutan, perbankan dan perusahaan jasa lainnya.
- c. Wilayah Pembangunan Bagian Barat dengan pusat pengembangan di Majene, yang meliputi; Kabupaten Majene, Polmas dan Mamuju.
- Kegiatan usaha yang akan dikembangkan pada wilayah pembangunan ini meliputi; tanaman perkebunan coklat, kelapa, kopi; kehutanan; perikanan/pertambakan; industri kecil dan menengah; perdagangan dan transportasi.
- d. Wilayah Pembangunan Bagian Utara dengan pusat pengembangan di Palopo, yang meliputi; Kabupaten Luwu dan Tana Toraja.
- Kegiatan usaha yang akan dikembangkan pada wilayah pembangunan ini adalah tanaman pertanian cengkeh, kopi; kehutanan; industri, (agroindustri dan industri pariwisata); perdagangan dan transportasi.
- e. Wilayah Pembangunan Bagian Timur dengan pusat pengembangan di Watampone, yang meliputi; Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai.
- Pada wilayah pembangunan ini akan dikembangkan kegiatan usaha tanaman padi, palawija, cengkeh; peternakan; perikanan/tambak; industri kecil dan rumah tangga; perdagangan dan transportasi.

Agar pusat-pusat produksi yang telah ditetapkan dalam program pengwilayahan komoditi tersebut dapat berfungsi secara optimal diperlukan jasa pelayanan melalui pusat wilayah pembangunan ke daerah-daerah dalam wilayah jangkauan pelayanan sebagai daerah hinterland-nya yang ditetapkan atas berbagai faktor pertimbangan, terutama faktor geografis. Jasa

pelayanan tersebut terdiri dari sarana dan prasarana, serta fasilitas penunjang kegiatan lainnya.

Keseluruhan jasa pelayanan tersebut tergolong dalam faktor aksesibilitas (faktor kemudahan hubungan), yakni kemudahan bagi penduduk dalam memperoleh dan memenuhi berbagai kebutuhan, baik kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan untuk melakukan kegiatan usahanya. Dalam hubungan tersebut, tingkat kemudahan ikut mempengaruhi arti pendapatan yang diperoleh masyarakat.

B. Pembangunan Sektoral

Pembangunan sektoral dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi seluruh sektor kegiatan usaha, antara lain terdiri atas:

- a. Usaha peningkatan industri tanaman pangan yang ditempuh melalui empat usaha pokok, yaitu intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi tanaman pangan.
- b. Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria.
- c. Usaha transmigrasi lokal dalam rangka penyebaran penduduk.
- d. Mengembangkan penanaman modal/investasi dari berbagai sumber.
- e. Menggalakkan kegiatan usaha perkoperasian.
- f. Pembangunan fasilitas perumahan perkotaan dan pedesaan.
- g. Pembangunan dan pengembangan potensi sektor pertambangan.
- h. Peningkatan peranan kepariwisataan sebagai salah satu penghasil devisa negara.
- i. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, telekomunikasi, pos dan giro.
- j. Mempercepat proses industrialisasi terutama sektor agroindustri, industri kecil, industri kerajinan, dan industri rumah tangga, khususnya di daerah pedesaan.

- k. Peningkatan pembangunan sektor pendidikan.
- l. Peningkatan pembangunan sektor kesehatan dan keluarga berencana kepedesaan.
- m. Pembangunan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- n. Usaha peningkatan dan perluasan kegiatan penerangan atau informasi keseluruh pelosok pedesaan.

3.2 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Maros

3.2.1 Kebijakan Spasial

Pada hakekatnya, perwilayahan pembangunan merupakan upaya untuk memformulasikan usaha pemanfaatan ruang secara optimal dan efisien bagi manusia diwilayahnya yang mencakup kegiatan pembangunan sektoral daerah dan masyarakat dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga jelaslah bahwa perwilayahan pembangunan bertujuan untuk keseimbangan pembangunan dan potensi wilayah.

Perwilayahan pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Maros pada Repelita Kelima, disusun dengan mempertimbangkan hubungan kegiatan ekonomi, letak geografis, latar belakang sosial budaya dan sumber daya yang ada, serta faktor-faktor pembatas.

Maksud dan tujuan pengembangan wilayah adalah meletakkan dasar bagi pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, pemerataan pembangunan diseluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan diwilayah dan menjamin keserasian serta koordinasi antar daerah. Selain itu pula memberikan pengarahan kegiatan pembangunan bagi aparatur pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta.

Berdasarkan tujuan pembangunan perwilayahan di atas maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros dalam Repelita Kelima telah menetapkan kebijaksanaan spasial ke dalam 3 (tiga) wilayah pembangunan dengan pusat-pusat pengembangannya sebagai berikut:

- a. Wilayah Pembangunan Bagian Barat dengan pusat pengembangan di Alliritengae yang meliputi Kecamatan Maros Baru, Maros Utara dan Bantimurung. Wilayah-wilayah ini meliputi Kelurahan Bajubodoa, Boribellaya, Allepolea, Pettuadae, Maccini Baji, Bonto Tallasa, Botolempangan, Je'netaesa dan Desa Persiapan Sambueja.
- b. Wilayah Pembangunan Bagian Selatan dengan pusat pengembangan di Kelurahan Hasanuddin. Wilayah pengembangan ini meliputi; Kecamatan Mandai, Tanralili, dan Desa Moncong Loe, Tenrigangkae, Allaera, Kurusumange, Toddopulia, Tompobulu dan Desa Persiapan Pattontongan, serta Benteng Gajah.
- c. Wilayah Pembangunan Bagian Timur dengan pusat pengembangan di Kelurahan Campalagia, yang terdiri atas; Kecamatan Camba dan Kecamatan Mallawa. Wilayah ini meliputi; Desa Cenrana, Sawaru, Timpuseng, Laiya, Labuaja, Rompegading, Limampocoe, Pattanyameng, Tellumpanuae, Samaenre, Padaelo, Wanuwawaru, dan Batu Putih, serta Desa Persiapan Bantenga dan Cenrana Baru.

3.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros

Prioritas pembangunan merupakan perwujudan pembangunan daerah yang diutamakan/diprioritaskan, dengan berpedoman pada Pola Dasar Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan pembangunan dan arah pembangunan.

Tujuan pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Maros adalah merupakan bagian integral dari tujuan Pembangunan Daerah Sulawesi

Selatan dalam Repelita Kelima sesuai Pola Dasar Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan akan dapat terwujudkan, yaitu:

- a. Menunjang dan mendukung tercapainya tujuan Repelita Kelima Nasional dan Repelita Kelima Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- b. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya dengan memperhatikan dan memperhitungkan perkembangan potensi dan aspirasi masyarakat.
- c. Memantapkan dan mengembangkan potensi Sulawesi Selatan sebagai pusat pengembangan dan pusat pertumbuhan di Wilayah Indonesia Bagian Timur.

Agar tujuan pembangunan daerah dapat terwujud maka pelaksanaan pembangunannya perlu diarahkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros mempunyai arah pembangunan daerah, sebagai berikut:

- a. Titik berat pembangunan daerah adalah pembangunan di bidang ekonomi, sasaran untuk tercapainya struktur ekonomi daerah yang berimbang antara sektor pertanian dan sektor industri, serta terpenuhinya kebutuhan rakyat. Pembangunan di bidang lainnya tetap dilaksanakan dan ditingkatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi sesuai dengan kebijaksanaan nasional.
- b. Pemanfaatan penjabaran pengwilayahan komoditi sebagai Strategi Dasar Penataan Tata Ruang Wilayah diperlukan untuk:
 - Peningkatan produksi pertanian yang dibarengi pelestarian lingkungan melalui penyiapan secara mantap seluruh prasarana dan sarana penunjang, utamanya irigasi, prasarana jalan dan jembatan, serta reboisasi dan penghijauan
 - Peningkatan efisiensi perencanaan pembangunan melalui Penataan Tata Ruang Wilayah

- Pemberian informasi yang memadai bagi rencana investasi-investasi pembangunan.
 - Upaya untuk penerbitan dan pematapan penanganan catur tertib pertanahan.
- c. Pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi ditujukan pada peningkatan produksi, jasa, dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan yang disertai dengan pembagian pendapatan yang merata untuk mewujudkan keadilan sosial dan memperkecil jurang pemisah antara kaya dan yang miskin, sehingga dapat dicapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata.
- d. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, maka seluruh dana harus dapat digali baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah, baik yang ada di daerah maupun yang berasal dari luar daerah. Pemanfaatan dana-dana pembangunan tersebut dilakukan dengan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang membimbing dan peningkatan kemampuan swasta terutama golongan ekonomi lemah dan koperasi.
- e. Pelaksanaan pembangunan di samping peningkatan produksi, maka pertumbuhan ekonomi harus dapat pula mempercepat pertumbuhan lapangan kerja dan kesempatan kerja. Hal ini merupakan sasaran penting untuk mengurangi pengangguran. Untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia diperlukan tenaga kerja yang cakap dan terampil sesuai dengan keperluan pembangunan. Untuk itu sistem pendidikan dan latihan keterampilan harus mampu menghasilkan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan pembangunan.
- f. Agar pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan cepat, maka harus dibarengi dengan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Program Keluarga Berencana dan usaha pemerataan produksi yang lebih wajar melalui

program penataan pemukiman sesuai pola tata ruang yang telah ditetapkan.

- g. Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Kabupaten Maros harus dimanfaatkan secara nasional. Penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan dengan tidak merusak lingkungan hidup, tetapi dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.
- h. Peningkatan produksi tanaman pangan di Kabupaten Maros untuk menunjang pemanfaatan swasembada pangan nasional harus tetap dilaksanakan. Di samping itu tetap diusahakan pula diversifikasi tanaman pertanian dalam daerah maupun untuk ekspor.
- i. Dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi ke arah yang seimbang, memperluas lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi, maka perlu ditingkatkan melalui pengembangan industri kecil/kerajinan dan tradisional, utamanya di pedesaan.
- j. Menjamin terciptanya kepastian dan tertib hukum untuk kelangsungan pembangunan.
- k. Memanfaatkan demokrasi ekonomi Pancasila berdasarkan azas kekeluargaan sesuai pasal 33 UUD 1945, khususnya kepribadian yang menjiwai perekonomian masyarakat.
- l. Menggali, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka menunjang kebudayaan nasional dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa dan norma-norma agama.
- m. Memanfaatkan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat sesuai UUD 1945 yang dapat dirasakan secara lahiriah dan batiniah untuk mewujudkan Kabupaten Maros sebagai daerah yang mampu mendukung kekuatan Hamkamnas.

3.3 Fungsi dan Peranan Kota Maros

Kota Maros yang merupakan Ibukota Kabupaten Maros mempunyai fungsi dan peran yang beragam, serta tergantung pada tingkatan daerah yang dilayaninya maupun perkembangan yang terjadi di dalam Kota Maros itu sendiri.

Secara umum, Kota Maros mengemban fungsi dan peran ganda, yaitu di samping fungsi dan peran sekunder/lokal juga fungsi primer/regional. Fungsi sekunder atau lokal dari peran kota adalah dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan bagi kesejahteraan kehidupan penduduk kotanya sendiri.

Sedangkan fungsi primer atau regionalnya adalah sebagai pusat pemerintahan kabupaten, yaitu dalam peranannya memberikan pelayanan bagi berlangsungnya pemerintahan di daerah-daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Maros.

Di samping itu juga berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi bagi wilayah pengembangannya dalam usaha memasarkan hasil-hasil pertanian daerah dan mengalirkan barang-barang kebutuhan ke daerah-daerah pengaruhnya (hinterland-nya).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, disimpulkan bahwa fungsi dan peran Kota Maros adalah:

- Sebagai pusat pemerintahan, Kota Maros berfungsi mengurus, melayani, dan mengontrol segala kegiatan administrasi pemerintahan bagi daerah yang lebih luas (dalam hal ini Kabupaten Daerah Tingkat II Maros). Dengan demikian, Kota Maros merupakan pusat administrasi yang melayani kepentingan penduduk dan seluruh kegiatan kabupaten.

- Sebagai pusat kegiatan pembangunan dalam bidang fisik, sosial, dan ekonomi, serta sebagai alat penghubung bagi daerah-daerah yang merupakan kesatuan wilayah administrasinya.
- Sebagai pusat pelayanan masyarakat, dengan demikian Kota Maros berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, berarti harus dapat menyediakan jasa-jasa pelayanan dalam menunjang fungsi sebagai penyedia sumber penghidupan bagi penduduknya.

Kenyataan di atas, menggambarkan bahwa Kota Maros memiliki fungsi adalah sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam daerah wewenangnya maupun daerah sekitarnya yang mempunyai akses yang baik terhadap Kota Maros.

Sesuai dengan adanya sejumlah fungsi yang diemban, maka kedudukan Kota Maros ini memegang peranan yang penting dalam memacu dan menjalankan perkembangan dan pembangunan ke wilayah-wilayah pengaruhnya di Kabupaten Maros, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan sosial ekonomi dari sektor-sektor yang dikembangkan atau diprioritaskan.

3.4 Kondisi Fisik

Gambaran mengenai kondisi fisik wilayah Kota Maros, baik kondisi fisik dasar maupun kondisi fisik artifisial (buatan/binaan manusia) pada bagian ini bersumber pada data yang dihimpun dari hasil survey lapangan dan instansi. Adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan pendataan tersebut, diuraikan sebagai berikut:

3.4.1 Kondisi Fisik Dasar

A. Luas dan Batas Administrasi

Dalam Rencana Tata Kota Maros dan Rencana Kerangka Umum Kota Maros (Ibukota Kabupaten Maros), belum memiliki batas administrasi dan hanya terdiri dari empat kelurahan yang definitif, yaitu Kelurahan Alliritengae, Boribellaya, Pettuadae, dan Bajubodoa.

Dari gambaran umum Kota Maros yang diperoleh melalui Buku Rencana yang telah disusun dari hasil penelitian lapangan dalam upaya penyusunan Rencana Induk Kota Maros menunjukkan peningkatan kegiatan perkotaan sehingga wilayah kotanya mengalami perubahan menjadi lima kelurahan definitif, yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Maros Baru.

Luas Kota Maros saat ini (tahun 1998) adalah 133,41 km² atau 13.341 ha, dibentuk oleh batas administratif dari lima kelurahan definitif, yaitu Kelurahan Alliritengae, Boribellaya, Pettuadae, Bajubodoa, dan Allepolea.

Adapun batas-batas administrasi Kota Maros adalah:








- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Maccini Baji
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ma'rumpa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bantimurung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Borikamase

Untuk lebih jelasnya, batas-batas administrasi wilayah Kota Maros, dapat dilihat pada gambar 3.1.


**STUDI IDENTIFIKASI
FAKTOR FAKTOR PERKEMBANGAN
KOTA MAROS**

Gambar : 3.1
PETA ADMINISTRASI

KETERANGAN

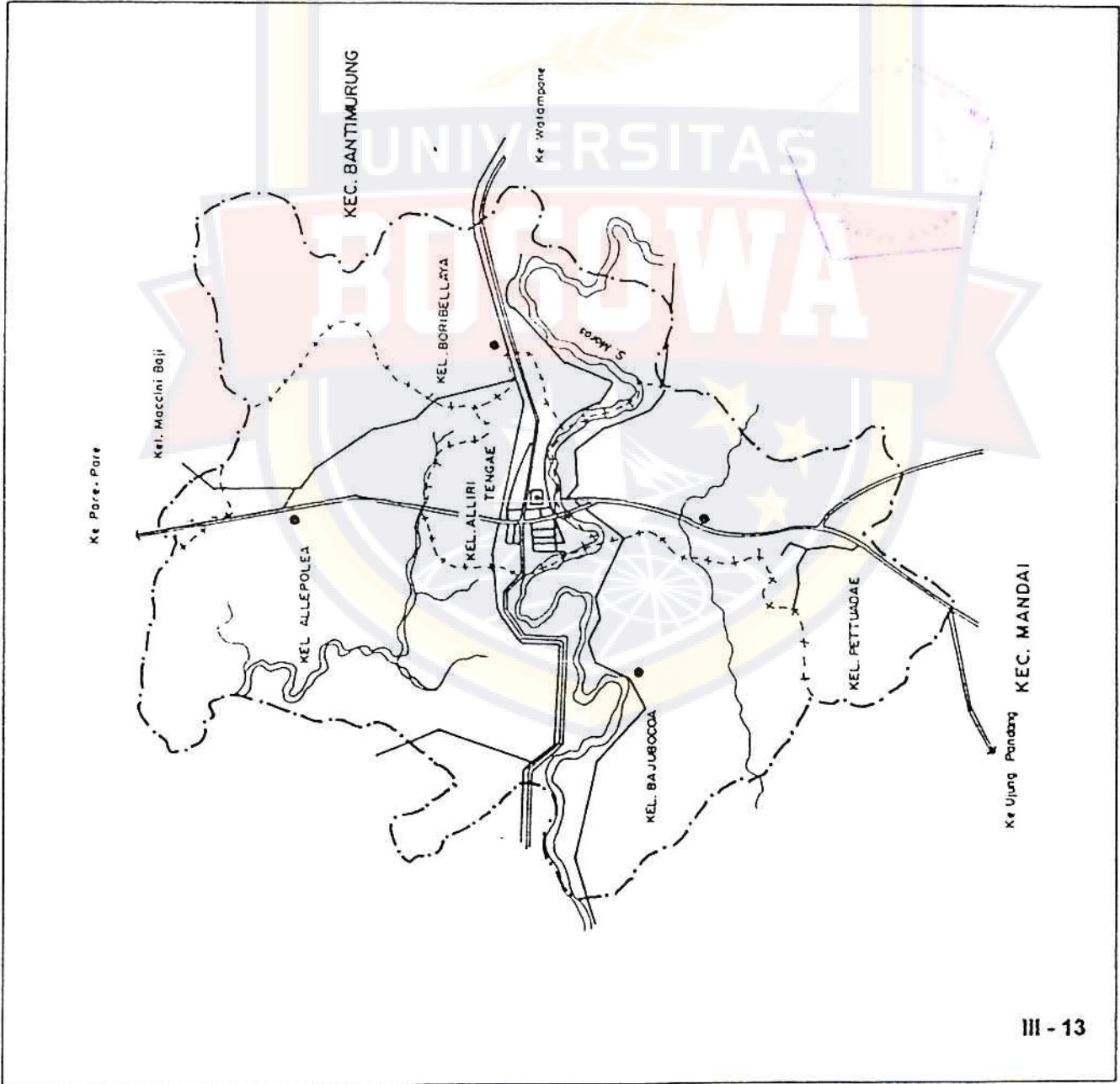
	Batas Kota Maros
	Batas Kelurahan
	Jalan
	Sungai
	Saluran
	Pusat Kota
	Pusat Kelurahan

MAHASISWA / NO. POKOK	
SUGENG PRESTIHARYONO	
43 86 04 0361 / 87 113 4505	
DOSEN PEMBIMBING	PARAF
Ir. H. AMBO ENRE BS, MSI	
Drs. ABD. AZIS MATTOLA, MSP	
Ir. BURHANUDDIN BADRUN	

 SKALA 1 : 7.500

Sumber :- Revisi RUTRK Maros.

**JURUSAN PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS " 45 "**

B. Kondisi Topografi

Keadaan topografi di Kota Maros, umumnya memiliki permukaan tanah yang datar, yaitu sekitar 2-8 meter di atas permukaan air laut. Hal ini mengakibatkan keadaan lereng/kemiringan tanah hanya berkisar antara 0-3 %. Kondisi lereng yang umumnya datar, menyebabkan tingkat kecepatan pengaliran air yang cukup kecil, yaitu 0,5 m/detik.

C. Kondisi Geologi

Secara umum, keadaan tanah di Kota Maros memiliki jenis tanah Alluvial Hidromorf, dengan bahan induk endapan liat (Marine) yang terbentang disepanjang pantai barat. Selain itu terdapat pula jenis tanah Alluvial Kelabu. Keadaan efektif tanah di wilayah ini lebih besar dari 90 cm dengan tekstur tanah yang halus (liat) dan hampir tidak ada erosi.

D. Kondisi Iklim dan Hidrologi

Wilayah Kota Maros dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim hujan yang jatuh pada musim angin barat (Bulan Oktober-April) dan musim kemarau yang terjadi pada waktu musim angin timur (Bulan April-Oktober), dengan temperatur udara rata-rata 26⁰C dan memiliki curah hujan rata-rata 3.000 mm/tahun.

3.4.2 Kondisi Fisik Artifisial

A. Perkembangan Kawasan Terbangun

Dalam perkembangannya, bentuk Kota Maros memiliki kecenderungan menyebar dalam lokasi kawasan terbangunnya. Perkembangan kawasan terbangun di Kota Maros berorientasi pada Jalan Dr. Ratulangi dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kedua jaringan jalan ini merupakan jalur jalan

regional yang menghubungkan Kota Maros dengan kota-kota yang terdapat dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

Oleh karena berorientasi pada jalur regional, maka perkembangan kawasan terbangun cenderung membentuk pola linier dengan memanfaatkan jalur jalan tersebut sebagai penunjang aksesibilitasnya. Sedangkan pola jaringan jalan yang ada di Kota Maros membentuk pola grid, dengan sumbu utama adalah Jalan Dr. Ratulangi yang memanjang dari Utara ke Selatan, serta Jalan Takwa dan Jalan Jenderal Ahmad Yani yang terbentang dari Timur ke Barat.

B. Perkembangan Penggunaan Lahan

Perkembangan penggunaan lahan di Kota Maros, banyak dipengaruhi oleh fungsi dan peran Kota Maros, yaitu sebagai pusat kegiatan ekonomi, jasa, pelayanan sosial budaya, dan pusat administrasi pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

Dari data yang diperoleh, penggunaan lahan di Kota Maros pada tahun 1996 didominasi oleh penggunaan lahan sawah dan perumahan/pekarangan, yaitu masing-masing 3.564,82 ha dan 658,00 ha. Dan apabila melihat data tahun 1998, luas penggunaan lahan terbesar masih ditempati oleh penggunaan lahan sawah dan perumahan/pekarangan, masing-masing 2.884,00 ha dan 1.287,02 ha. Penggunaan lahan selebihnya digunakan untuk lahan kering, berupa tegalan, perkebunan, padang rumput, kolam/tambak, dan penggunaan lainnya seluas 9.169,98 ha.

Berdasarkan gambaran penggunaan lahan di atas terlihat bahwa kegiatan perumahan menunjukkan adanya kenaikan dalam penggunaan lahannya, yaitu sekitar 50,35% atau sebesar 431,02 ha. Akan tetapi

sebaliknya, penggunaan lahan pertanian (sawah) mengalami penurunan sekitar 19,10 % atau sebesar 680,82 ha. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Kota Maros dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.2.

C. Kecenderungan Arah Perkembangan Perumahan

Di Kota Maros, kelompok perumahan umumnya berorientasi pada tempat di mana penduduk melakukan kegiatan usahanya. Keadaan ini memperlihatkan bahwa kelompok-kelompok perumahan terkonsentrasi pada tempat di mana kehidupan kegiatan perkotaan berlangsung.

Dengan demikian, perkembangan kegiatan perumahan di Kota Maros, umumnya tumbuh secara alamiah dari proses tanpa perencanaan sebagai akibat perkembangan kegiatan perdagangan yang menempati jalan raya ekonomi. Hal ini berarti perumahan penduduknya berkembang dengan mengambil pola lokasi yang efisien dengan tingkat kemudahan yang tinggi ke tempat-tempat mereka bekerja.

Apabila dilihat dari kecenderungan perkembangan perumahan, menunjukkan arah ke Selatan (Kelurahan Pettuadae) dan ke pusat kota (Kelurahan Alliritengae). Hal ini disebabkan, di Kelurahan Pettuadae mempunyai angka kepadatan penduduk yang masih rendah dan mempunyai aksesibilitas yang tinggi ke Kota Ujungpandang (ibukota Propinsi Sulawesi Selatan), sedangkan untuk Kelurahan Alliritengae merupakan kelurahan di mana terkonsentrasinya fasilitas umum Kota Maros. Dan jumlah rumah yang ada di Kota Maros seluruhnya berjumlah 9.869 unit (Lihat Tabel 3.2). Untuk lebih jelasnya mengenai penyebaran fasilitas di Kota Maros, dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Tabel 3.1
 Penggunaan Lahan di Kota Maros
 Tahun 1996 dan 1998

No	Kelurahan	Tahun 1996					Tahun 1998					
		Sawah	Pekarangan/ Perumahan	Tegal	Perkebunan	Kolam/ Tambak	Lain- Lain-	Sawah	Pekarangan/ Perumahan	Tegal	Perkebunan	Kolam/ Tambak
1	Alliritengae	215,43	101,03	-	-	698,54	187,00	257,53	-	-	1,17	569,30
2	Boribellaya	812,28	103,02	-	8,25	2.848,45	824,40	152,00	-	8,50	-	2.786,60
3	Pettuadae	1.023,00	209,41	-	12,10	1.570,58	616,80	266,40	87,54	-	15,00	1.779,26
4	Bajubodoa	772,94	230,41	20,00	23,52	2.211,08	298,80	382,14	138,06	-	34,15	2.470,85
5	Allepolea	741,17	212,22	-	10,25	1.385,09	906,50	228,95	-	213,00	70,00	996,55
Kota Maros		3.564,82	856,09	20,00	54,12	8.713,74	2.833,50	1.287,02	225,60	221,50	120,32	8.602,56

Sumber : Potensi Desa, Kecamatan Maros Baru, tahun 1999













STUDI IDENTIFIKASI

**FAKTOR FAKTOR PERKEMBANGAN
KOTA MAROS**

Gambar : 3.2

PETA PENGGUNAAN LAHAN

KETERANGAN

-  Batas Kota Maros
-  Batas Kelurahan
-  Jalan
-  Sungai
-  Saluran
-  Perumahan
-  Sawah
-  Kebun, Tegalan, Ladang
-  Perkantoran
-  Perdagangan
-  Fasilitas Umum
-  Industri

MAHASISWA / NO. POKOK

SUGENG PRESTIHARYONO
43 86 04 0561 / 87 113 4505

DOSEN PEMBIMBING

Ir. H. AMBO ENRE BS, MSI

Dr. ABD. AZIS MATTOLA, MSP

Ir. BURHAHUDDIN BADRUN

PARAF



SKALA 1 : 7.500

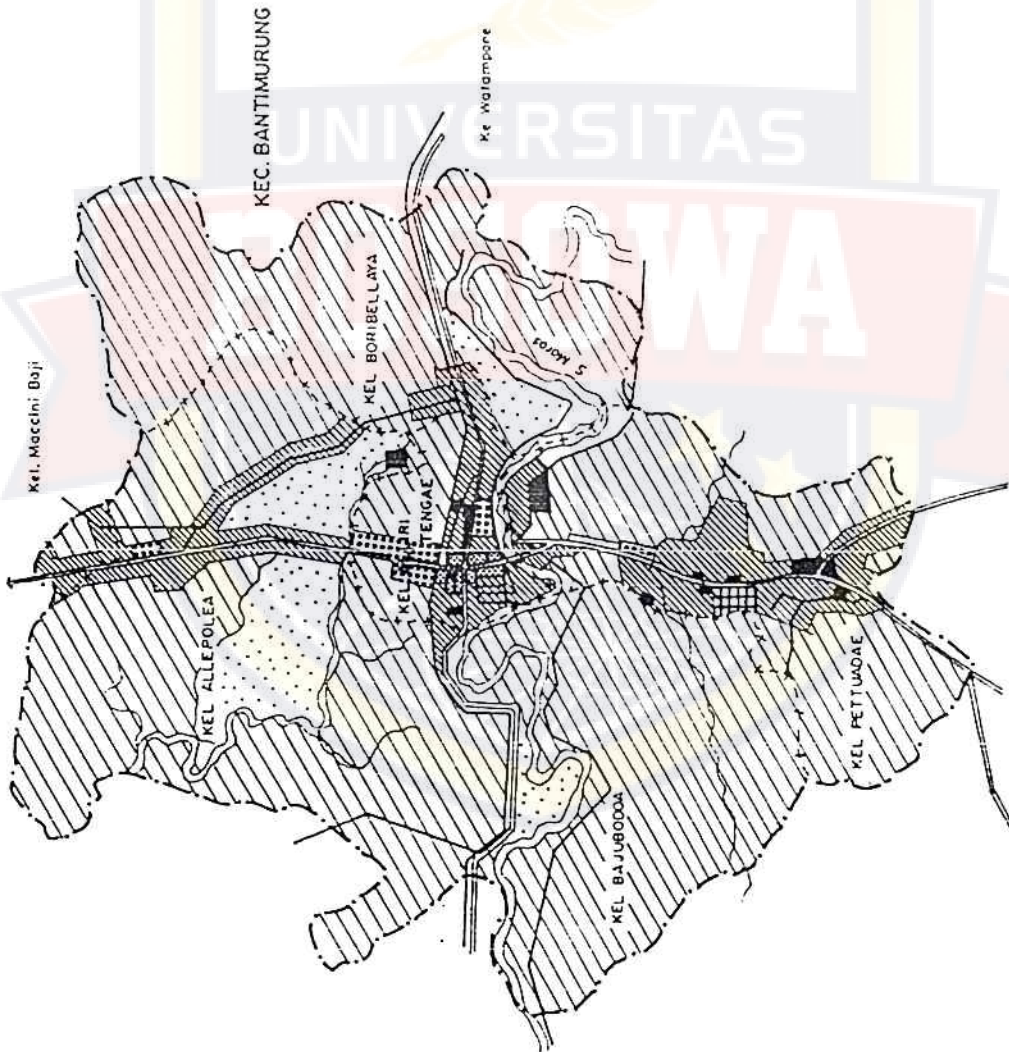
Sumber :- Kantor Bappeda
- Hasil Survey Lapangan



**JURUSAN PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS " 45 "**

Ke Pare - Pare

Kei. Maccini Daji



Ke Ujung Pandang
KEC. MANDAI

STUDI IDENTIFIKASI FAKTOR FAKTOR PERKEMBANGAN KOTA MAROS

Gambar : 3.3
PETA PENYEBARAN FASILITAS

- KETERANGAN**
- — — — — Batas Kota Maros
 - - - - - Batas Kelurahan
 - — — — — Jalan
 - ~ ~ ~ ~ ~ Sungai
 - — — — — Saluran
 - ① Sekolah
 - ② Masjid
 - ③ Gereja
 - ④ Perkantoran
 - ⑤ Rumah Sakit / Puskesmas
 - ⑥ Perdagangan

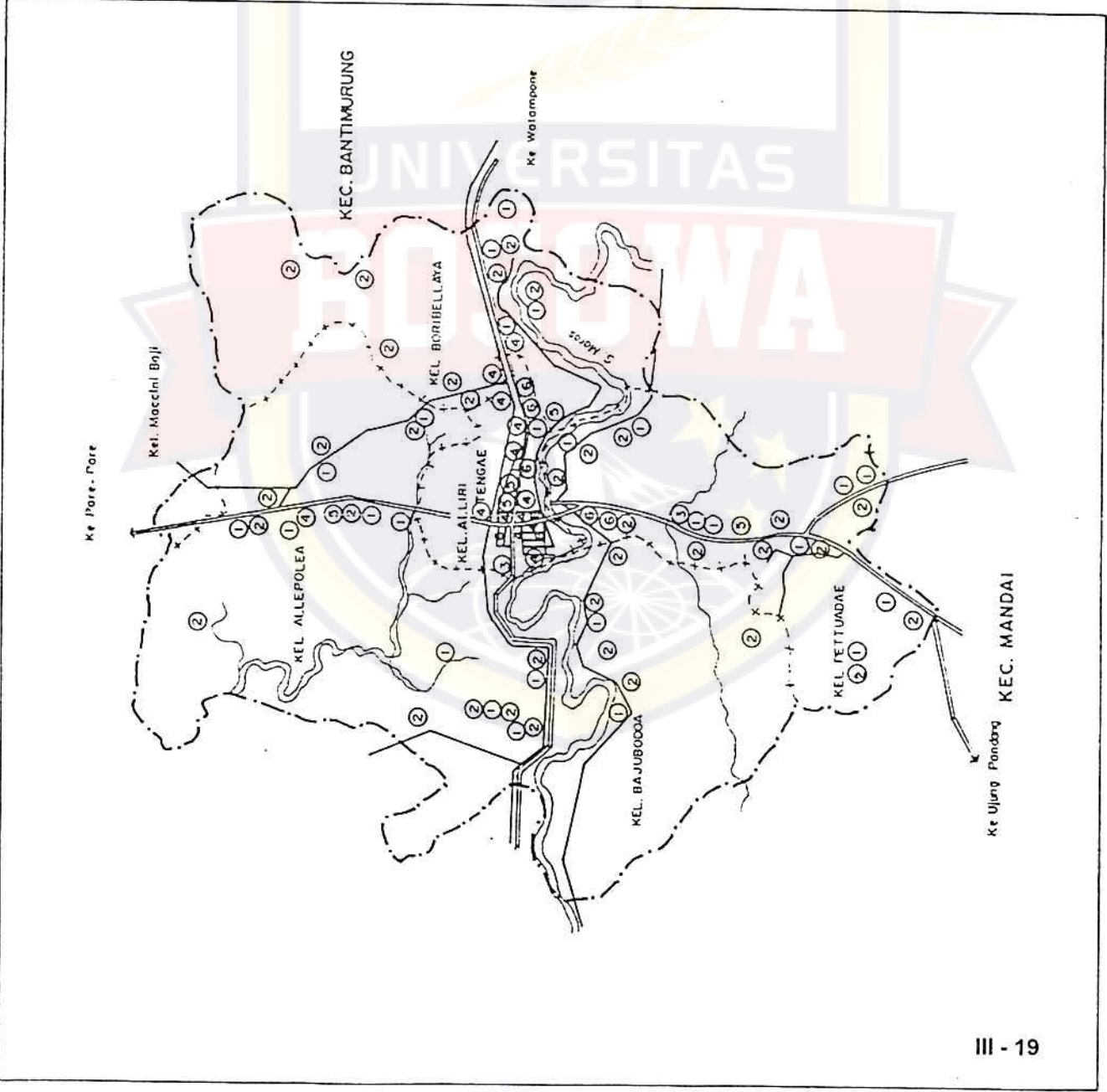
MAHASISWA / NO. POKOK
 SUDENG PRESTIHARYONO
 45 86 04 0561 / 87 113 4505

DOSEN PEMBIMBING
 PARAF
 Ir. H. AMBO ENRE BS, MSI
 Dra. ABD. AZIS MATTOLA, MSP
 Ir. BURHANUDDIN BADRUN

 SKALA 1 : 7.500

Sumber : - Revisi RIK Maros,
 - Hasil Survey


**JURUSAN PLANOLOGI
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS "45"**



Tabel 3.2
Jumlah Rumah di Kota Maros
Tahun 1998

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Rumah
1	Alliritengae	12.001	3.038
2	Boribellaya	5.453	1.032
3	Pettuadae	11.343	2.105
4	Bajubodoa	11.385	2.140
5	Allepolea	8.282	1.554
	Jumlah	48.464	9.869

Sumber : *Potensi Desa, Kecamatan Maros Baru, Tahun 1999*

3.5 Kependudukan

Pada mulanya proses perkembangan Kota Maros dimulai dari adanya penambahan jumlah penduduknya. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan suatu modal bagi tersedianya tenaga kerja dan telah mempengaruhi peningkatan kegiatan ekonomi kotanya. Kerena keadaan penduduk di Kota Maros merupakan pencerminan dari kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kotanya, maka penambahan penduduk telah mendorong pemusatan dan peningkatan kegiatan-kegiatan fungsional.

3.5.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kota Maros dari tahun 1988 hingga tahun 1998, umumnya mengalami peningkatan, dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,30 % per tahun. Dari data yang diperoleh, menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada tahun 1988 hanya mencapai 35.851 jiwa, akan tetapi pada tahun 1998 telah mencapai 48.464 jiwa atau bertambah sebanyak 12.613 jiwa atau sekitar 35 % dari total jumlah penduduk Kota Maros tahun 1988.

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah penduduk Kota Maros dari tahun 1988 hingga tahun 1998, dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Maros
Tahun 1988 – 1998

Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)											Rata-Rata Pertumbuhan/T ahun (%)
	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
Alliritengae	10.373	10.524	10.678	10.834	10.992	11.152	11.315	11.480	11.649	11.822	12.001	1,47
Boribellaya	3.405	3.573	3.749	3.794	4.128	4.331	4.544	4.768	5.001	5.245	5.453	4,90
Pettuadae	7.876	8.171	8.477	8.794	9.123	9.464	4.818	10.158	10.565	10.921	11.343	3,69
Bajubodoa	7.433	6.226	8.524	8.844	9.170	9.508	9.859	10.223	10.600	10.989	11.385	3,69
Allepolea	6.264	6.440	6.621	6.807	6.998	7.194	7.396	7.604	7.818	8.043	8.282	2,80
Kota Maros	35.851	36.934	38.049	39.213	40.411	41.649	42.932	44.233	45.533	47.020	48.464	3,30

Sumber : - Potensi Desa, Kecamatan Maros Baru, Tahun 1999
- Hasil Perhitungan

Pesatnya pertumbuhan penduduk ini tidak hanya disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk secara alamiah saja, melainkan banyak dipengaruhi oleh adanya peningkatan fungsi Kota Maros yang membawa konsekwensi pada peningkatan fasilitas-fasilitas kotanya, karena kecenderungan dari pergerakan penduduk adalah motivasinya di dalam usaha pencapaian fasilitas sebagai pemenuhan kebutuhan yang semudah-mudahnya.

3.5.2 Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Ditinjau dari segi penyebaran penduduk Kota Maros, belum merata pada setiap kelurahan. Adapun kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kelurahan Alliritengae, yaitu sebanyak 12.001 jiwa, sedangkan Kelurahan Boribellaya dengan jumlah penduduk 5.453 jiwa adalah kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terkecil. Untuk lebih

jelasan mengenai penyebaran penduduk di Kota Maros, dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Penyebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Maros
Per Kelurahan Tahun 1998

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Pddk (jiwa/Ha)
1	Alliritengae	12.001	1.015	12
2	Boribellaya	5.453	3.772	1
3	Pettuadae	11.343	2.815	4
4	Bajubodoa	11.385	3.324	3
5	Allepolea	8.282	2.415	3
Jumlah		48.464	13.341	5

Sumber : - *Potensi Desa, Kecamatan Maros Baru, Tahun 1999*
- Hasil Perhitungan

Apabila data yang ada pada tabel tersebut di atas, mengenai kepadatan penduduk Kota Maros diamati, terlihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi dan sekaligus memiliki kepadatan penduduk di atas rata-rata Kota Maros adalah Kelurahan Alliritengae, yaitu 12 jiwa/ha. Dan kepadatan penduduk terendah berada pada Kelurahan Boribellaya, yaitu 1 jiwa/ha. Untuk lebih jelasnya mengenai kepadatan penduduk di Kota Maros, dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Gambar 3.4.










3.5.3 Struktur Umur Penduduk

Meninjau keadaan penduduk Kota Maros menurut struktur umur, dimaksudkan untuk mengetahui besarnya angka beban tanggungan dan potensi tenaga kerja, yaitu perbandingan antara penduduk yang tidak/belum sanggup bekerja dengan yang ada dalam batas usia turut serta dalam proses produksi.

**STUDI IDENTIFIKASI
FAKTOR FAKTOR PERKEMBANGAN
KOTA MAROS**

Gambar : 3.4
PETA KEPADATAN PENDUDUK

KETERANGAN

-  Batas Kota Maros
-  Batas Kelurahan
-  Jalan
-  Sungai
-  Saluran
-  1 Jiwa/Ha
-  3 Jiwa/Ha
-  4 Jiwa/Ha
-  12 Jiwa/Ha

MAHASISWA / NO. POKOK

SUGENO PRESTIARTONO

45.86.04.0561 / 07.113.4503

DOSEN PEMBIMBING

PARAF

Ir. H. AMBO ENRE DS, M3I

Drs. ABD. AZIS MATTOLA, MSP

Ir. BURHANUDDIN BADRUM



SKALA 1 : 7.500

Sumber : Tabel 3.3



JURUSAN PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45"

Ke Parepare

Kel. Klaccini Baji

KEL ALLEPOLEA

KEC. BANTIMURUNG

KEL BOMBELLWA

KEL ALLIRI
TENGAH

Ke Watampone

KEL BAJUBOODA

KEL PETTUODAE

Ke Ujung Pandang

KEC. MANDAI

Bila dilihat dari komposisi penduduk menurut struktur umur, dengan asumsi bahwa usia produktif berada antara umur 15-49 tahun, maka berdasarkan data yang tersedia pada Tabel 3.5, diperoleh bahwa angkatan kerja di setiap kelurahan di Kota Maros rata-rata 50,84 %.

Persentase ini menyatakan bahwa di tiap-tiap kelurahan, angka beban tanggungan setiap tenaga kerja produktif adalah rata-rata 49,16 % atau sama dengan satu, artinya ialah untuk setiap satu orang penduduk yang tidak/belum sanggup bekerja ditanggung oleh satu orang penduduk usia produktif. Hal ini merupakan suatu potensi tenaga kerja yang besar, terlebih apabila ditunjang dengan tersedianya lapangan kerja yang memadai pada kawasan produktif. Keadaan ini akan menjadi katalisator bagi perkembangan daerah sekitarnya.

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur
Per Kelurahan di Kota Maros Tahun 1998

No	Kelurahan	Kelompok Umur					
		0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 24	25 - 49	50 Ke atas
1	Alliritengae	1.325	1.341	1.604	2.861	3.577	1.293
2	Boribellaya	704	663	666	964	1.760	696
3	Pettuadae	1.482	1.523	1.454	2.270	3.582	1.032
4	Bajubodoa	1.353	1.602	1.458	2.319	3.293	1.360
5	Allepolea	999	1.261	1.150	1.734	2.382	756
	Jumlah	5.863	6.390	6.332	10.148	14.594	5.137

Sumber : Potensi Desa, Kecamatan Maros Baru, Tahun 1999

3.5.4 Mata Pencarian Penduduk

Apabila meninjau perkembangan struktur tenaga kerja di Kota Maros, diperoleh bahwa sebagian besar penduduknya mempunyai pekerjaan

sebagai petani. Keadaan ini tercermin dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja sebagai petani pada tahun 1998 adalah sebanyak 5.156 jiwa atau 53,03 % dari total penduduk Kota Maros yang bekerja pada sektor lainnya. Kemudian diikuti oleh penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang dan pegawai negeri/swasta, yaitu masing-masing sebanyak 1.755 jiwa atau 18,05 % dan 1.448 jiwa atau 14,89 %.

Dari kegiatan perdagangan yang ada di Kota Maros, jumlah pedagang sebagian besar berada di kelurahan Alliritengae, yaitu mencapai 1.172 jiwa atau 66,78 % dari total pedagang yang ada di Kota Maros. Dan selebihnya 33,22 % atau 583 jiwa tersebar di empat kelurahan lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk menurut mata pencaharian, dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Per Kelurahan Di Kota Maros Tahun 1998

No	Mata Pencaharian	Kelurahan					Jumlah
		Alliritengae	Boribellaya	Pettuadae	Bajubodoa	Allepolea	
1	Pegawai Negeri/ Swasta	510	89	178	230	441	1.448
2	ABRI	23	2	31	6	-	62
3	Pedagang	1.172	71	373	82	57	1.755
4	Petani	97	623	846	2.961	629	5.156
5	Pengrajin	67	2	89	2	28	188
6	Industri	32	48	39	33	28	193
7	Buruh	496	103	252	-	17	920
8	Pensiunan ABRI/ Sipil/Usia Non Produktif/ Penganggur	9.591	4.515	9.535	8.019	7.082	38.742
Jumlah		12.001	5.453	11.343	11.385	8.282	48.464

Sumber : Potensi Desa, Kecamatan Maros Baru, Tahun 1999

Terkonsentrasinya para pedagang di Kelurahan Alliritengae dapat dipahami, karena pada kelurahan tersebut di mana terletak pasar induk dan pertokoan. Berdasarkan kenyataan di atas, dan dari sekian banyak lapangan usaha yang ada di Kota Maros, ternyata jumlah penganggur mencapai 79,94 %. Apabila dibandingkan dengan struktur penduduk menurut umur (Lihat Tabel 3.5), dengan asumsi bahwa jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan 50 tahun ke atas merupakan usia belum dan tidak produktif ternyata merupakan beban tanggungan bagi yang sudah bekerja.

3.5.5 Sosial Budaya Penduduk

Karakteristik sosial budaya atau kebiasaan-kebiasaan suatu masyarakat sering di kaitkan dengan kebudayaan, baik dalam arti jenjang suatu bangsa, maupun dalam pembauran setiap suku bangsa adalah merupakan pencerminan dari corak, watak, sifat, dan karakter dari bangsa atau suku bangsa tersebut.

Demikian pula halnya dengan Kota Maros, memiliki suatu suku bangsa yang disebut sebagai Suku Bugis Makassar. Suku ini adalah salah satu diantara suku bangsa yang memiliki bahasa, dialek, dan huruf/aksara tersendiri. Di mana dalam kehidupan bermasyarakat masih dipengaruhi oleh suatu sistem, norma, aturan-aturan adat, dan dialek berbahasa dalam pergaulan sehari hari.

Rangkaian dari unsur-unsur pokok tersebut, terjalin satu dengan yang lainnya sebagai suatu kesatuan organis dalam alam pikiran orang bugis dan makassar yang memberi rasa harga diri dan identitas sosial kepadanya, serta martabat diri pribadi masing-masing yang terkandung dalam suatu konsep yang disebut dengan Siri.

Siri itu sendiri adalah suatu hal yang abstrak, hanya akibat-akibatnya yang terwujud kongkrit dan dapat diobservasi atau dikaji. Hal ini menunjukkan bahwa konsep siri tersebut meliputi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dan budaya Suku Bugis dan Makassar.

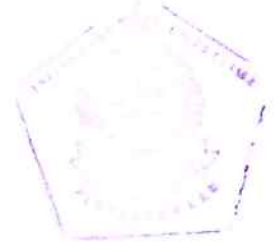
3.6 Kegiatan Sosial-Ekonomi

Sebagai pusat pertumbuhan, Kota Maros mempunyai peranan yang penting dalam menunjang kegiatan sosial-ekonomi masyarakatnya. Karena dengan adanya kegiatan penduduk, maka akan timbul kebutuhan fasilitas pelayanan dan jasa untuk pemenuhan kebutuhannya. Sehubungan dengan hal itu tinjauan mengenai kegiatan sosial-ekonomi Kota Maros pada bagian ini lebih dititikberatkan pada aspek kelengkapan fasilitas dan ketenagakerjaan.

3.6.1 Pendidikan

Kegiatan pendidikan di Kota Maros dapat dilayani oleh fasilitas pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yaitu meliputi 6 buah TK, 33 buah SD atau sederajat, 11 buah SLTP/sederajat, 5 buah SLTA/sederajat, 2 Sekolah Tinggi, dan 1 buah setingkat akademi.

Dengan tersedianya perguruan tinggi, yaitu Perguruan Tinggi Agama, STKIP, dan Akademi Perdagangan, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi perkembangan kotanya lebih lanjut, yaitu dalam hal penambahan penduduk, khususnya bagi penduduk yang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah fasilitas di Kota Maros, dapat dilihat pada Tabel 3.7.



Tabel 3.7
Fasilitas Pendidikan di Kota Maros
Per Kelurahan Tahun 1998

No	Kelurahan	Jenis Fasilitas Pendidikan				
		TK	SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi
1	Alliritengae	5	8	7	3	3
2	Boribellaya	-	4	-	-	-
3	Pettuadae	-	8	1	-	-
4	Bajubodoa	-	7	1	1	-
5	Allepolea	1	6	2	1	-
Jumlah		6	33	11	5	3

Sumber : Potensi Desa, Kecamatan Maros Baru, Tahun 1999

3.6.2 Perdagangan

Kegiatan perdagangan yang ada di Kota Maros dapat ditemukenali dari adanya satu pasar induk dan satu pasar pendukung, serta toko-toko yang menempati sepanjang jalan protokol, sehingga dengan demikian merupakan daya tarik bagi penduduk daerah sekitarnya untuk bekerja di mana pedagang kaki lima akan menyertainya pula. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah fasilitas perdagangan di Kota Maros, dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Fasilitas Perdagangan di Kota Maros
Per Kelurahan Tahun 1998

No	Kelurahan	Jenis Fasilitas Perdagangan		
		Pasar	Toko	Warung
1	Alliritengae	1	74	722
2	Boribellaya	-	3	11
3	Pettuadae	-	5	17
4	Bajubodoa	1	3	39
5	Allepolea	-	2	8
Jumlah		2	87	797

Sumber : Potensi Desa Kecamatan Maros Baru, Tahun 1999

Berdasarkan jangkauan pelayanannya, kegiatan perdagangan di Kota Maros, secara umum dapat digolongkan menjadi skala pelayanan regional maupun lokal atau kota itu sendiri. Walaupun hasil-hasil atau barang-barang yang keluar masuk Kota Maros belum dapat dipastikan seluruhnya memanfaatkan kotanya sebagai pusat pemasaran, akan tetapi apabila dilihat dari produksi daerah belakangnya yang umumnya merupakan hasil masyarakat golongan ekonomi lemah yang pemasarannya sebagian besar dilakukan di Kota Maros atau pusat lainnya, seperti Kota Ujungpandang.

3.6.3 Industri

Di samping kegiatan perdagangan, kegiatan ekonomi Kota Maros ditunjang oleh kegiatan industri, yaitu berupa industri rumah tangga dan industri ringan. Kegiatan industri di Kota Maros seluruhnya berjumlah 95 buah, terdiri dari 89 buah industri rumah tangga, 4 buah industri kecil, dan 2 buah industri sedang. Untuk lebih jelasnya, jenis industri dan jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor ini, dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Jenis Industri dan Jumlah Tenaga Kerja
Per Kelurahan di Kota Maros Tahun 1998

No	Kelurahan	Jenis Industri			Tenaga Kerja
		R. Tangga	Sedang	Kecil	
1	Alliritengae	21	1	2	45
2	Boribellaya	20	-	1	48
3	Pettuadae	19	-	1	39
4	Bajubodoa	17	-	-	33
5	Allepolea	12	1	-	28
Jumlah		89	2	4	193

Sumber : Potensi Desa, Kecamatan Maros Baru, Tahun 1999

Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor ini, seluruhnya sebanyak 193 orang. Jenis barang yang dihasilkan diantaranya berupa alat-alat/perabot rumah tangga, makanan dan minuman.

3.6.4 Pertanian

Kegiatan perekonomian yang belangsung di Kota Maros selain perdagangan dan industri adalah kegiatan pertanian, yang meliputi tanaman padi sawah dan palawija. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis tanaman, luas tanam, luas panen, dan produksi tanaman pertanian, dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Jenis Tanaman, Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Tanaman Pertanian di Kota Maros Tahun 1998

No	Tanaman Pertanian	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	2.883,74	2.864,91	11.919,15
2	Jagung	8,75	8,22	16,38
3	Ubi Jalar	15,05	14,87	312,26
4	Ubi Kayu	23,01	22,75	269,16
5	Kacang Tanah	9,05	8,60	10,37
6	Kacang Kedelai	66,87	65,99	54,68
7	Kacang Hijau	98,77	98,43	101,29
8	Kacang Merah	-	-	-
9	Kacang Putih	-	-	-
Jumlah		3.105,24	3.083,77	12.683,29

Sumber: Potensi Desa, Kecamatan Maros Baru, Tahun 1999

Dari tabel tersebut, nampak bahwa produksi tanaman padi sawah lebih besar dari pada produksi tanaman lainnya, yaitu 11.919,15 ton. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa tanaman padi sawah masih dominan diusahakan oleh penduduknya dibandingkan dengan jenis tanaman lainnya. Keadaan ini juga tercermin dari sebagian besar wilayah Kota Maros, luas lahan sawah

mencapai 2.884,00 ha atau 21,26 % dari total luas penggunaan lahan di Kota Maros, seperti yang tersaji pada Tabel 3.1 terdahulu.

3.7 Sistem Transportasi

Kota Maros dalam proses penyediaan dan pemberian pelayanan kebutuhan manusia dalam hubungannya dengan pola pergerakan manusia maupun barang sehari-hari, secara keseluruhan dapat dipenuhi. Keadaan ini tercermin dari kondisi pola jaringan jalan yang ada.

Dengan demikian untuk memperoleh gambaran mengenai seberapa besar pelayanan yang diberikan oleh jaringan jalan dalam menunjang perkembangan Kota Maros, maka peninjauannya akan meliputi:

- Prasarana dan sarana transportasi sebagai perantara perhubungan antara kota dan daerah.
- Pola pergerakan, baik di dalam kota maupun antar daerah sekitarnya.

3.7.1 Prasarana dan Sarana Transportasi

Di Kota Maros, prasarana transportasi dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 47,71 km dengan kondisi baik, dan 1 buah terminal bagi pelayanan angkutan dalam kota maupun keluar kota.

Dari kedua prasarana utama transportasi tersebut, menunjukkan bahwa Kota Maros memiliki peranan yang sangat penting artinya bagi pertumbuhan daerah sekitarnya. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan prasarana transportasi di Kota Maros, dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Keadaan Prasarana Transportasi di Kota Maros
Per Kelurahan Tahun 1998

No	Kelurahan	Jalan Propinsi		Jalan Kabupaten		Jalan Desa		Terminal
		P	L	P	L	P	L	
1	Alliritengae	4	6 – 8	9,41	6	6,80	4,0	1
2	Boribellaya	1,25	6	-	-	6,95	3,5	-
3	Pettuadae	7,00	8	-	-	2,50	4,0	-
4	Bajubodoa	-	-	3,00	6	6,80	4,0	-
5	Allepolea	2,00	10	-	-	11,00	7,0	-
Jumlah		12,25		12,41		23,05		1

Sumber : Potensi Desa, Kecamatan Maros Baru, 1999

Dalam usaha meningkatkan kebutuhan transportasi, pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros telah menetapkan terminal tersebut untuk pelayanan angkutan dalam kota dan angkutan keluar kota/daerah sekitarnya.

Terminal tersebut ditinjau dari segi pelayanannya dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan Kota Maros, karena dapat melayani berbagai kegiatan dalam mekanisme sosial dan ekonomi, terutama bagi jasa angkutan umum dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Selain itu adanya interaksi antar kota utama dan kota-kota kecamatan dalam kaitannya dengan transportasi daerah untuk kepentingan pelayanan angkutan barang dan manusia dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, maka pelayanan angkutan umum yang menuju kota-kota kecamatan mempunyai peranan yang cukup penting bagi peningkatan perekonomian dalam wilayah Kabupaten Maros. Untuk keperluan ini, pola pergerakan di

Kabupaten Maros dapat dilayani dengan banyaknya kendaraan umum setiap harinya, yaitu sebanyak 76 unit ke berbagai tujuan yang ada, dari jenis pete-pete (mikrolet). Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan sarana transportasi di Kota Maros, dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Keadaan Sarana Transportasi di Kota Maros
Per Kelurahan Tahun 1998

No	Kelurahan	Mobil	Pete-pete	Bus	Sepeda Motor	Delman	Gerobak	Becak
1	Alliritengae	76	32	-	87	12	7	50
2	Boribellaya	16	20	-	28	2	4	27
3	Pettuadae	45	24	1	53	5	5	19
4	Bajubodoa	9	-	-	11	4	-	7
5	Allepolea	21	-	-	125	9	-	6
Jumlah		169	76	1	304	32	16	109

Sumber : Potensi Desa, Kecamatan Maros Baru, Tahun 1999

3.7.2 Pola Pergerakan Dalam dan Keluar Kota

Pola pergerakan dalam dan keluar Kota Maros meliputi dua kategori, yaitu pergerakan barang dan orang, yang mempunyai arti interaksi sosial dan ekonomi. Di Kota Maros, pola pergerakan ditentukan oleh banyaknya lalu lintas yang keluar dan masuk melalui terminal dan jembatan timbang yang ada.

Dari Gambar 3.5, nampak bahwa volume lalu lintas sebagian besar arus pergerakan barang maupun orang yang menggunakan jalur utama, Kota Maros, Ujungpandang-Pangkep-Bone, dan jalur jalan yang menghubungkan Kota Maros dengan kota-kota kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Maros. Keadaan ini menunjukkan interaksi antar kota utama memberikan pengaruh yang kuat bagi perkembangan daerah sekitarnya.

**STUDI IDENTIFIKASI
FAKTOR FAKTOR PERKEMBANGAN
KOTA MAROS**

Gambar : 3 . 5
**PETA KUANTITAS ANGKUTAN UMUM
DARI KOTA MAROS**

KETERANGAN

	Batas Kabupaten
	Batas Kecamatan
	Ibukota Kabupaten
	Ibukota Kecamatan
	Jalan
	Sungai

	70%
	60%
	50%
	40%
	30%
	20%

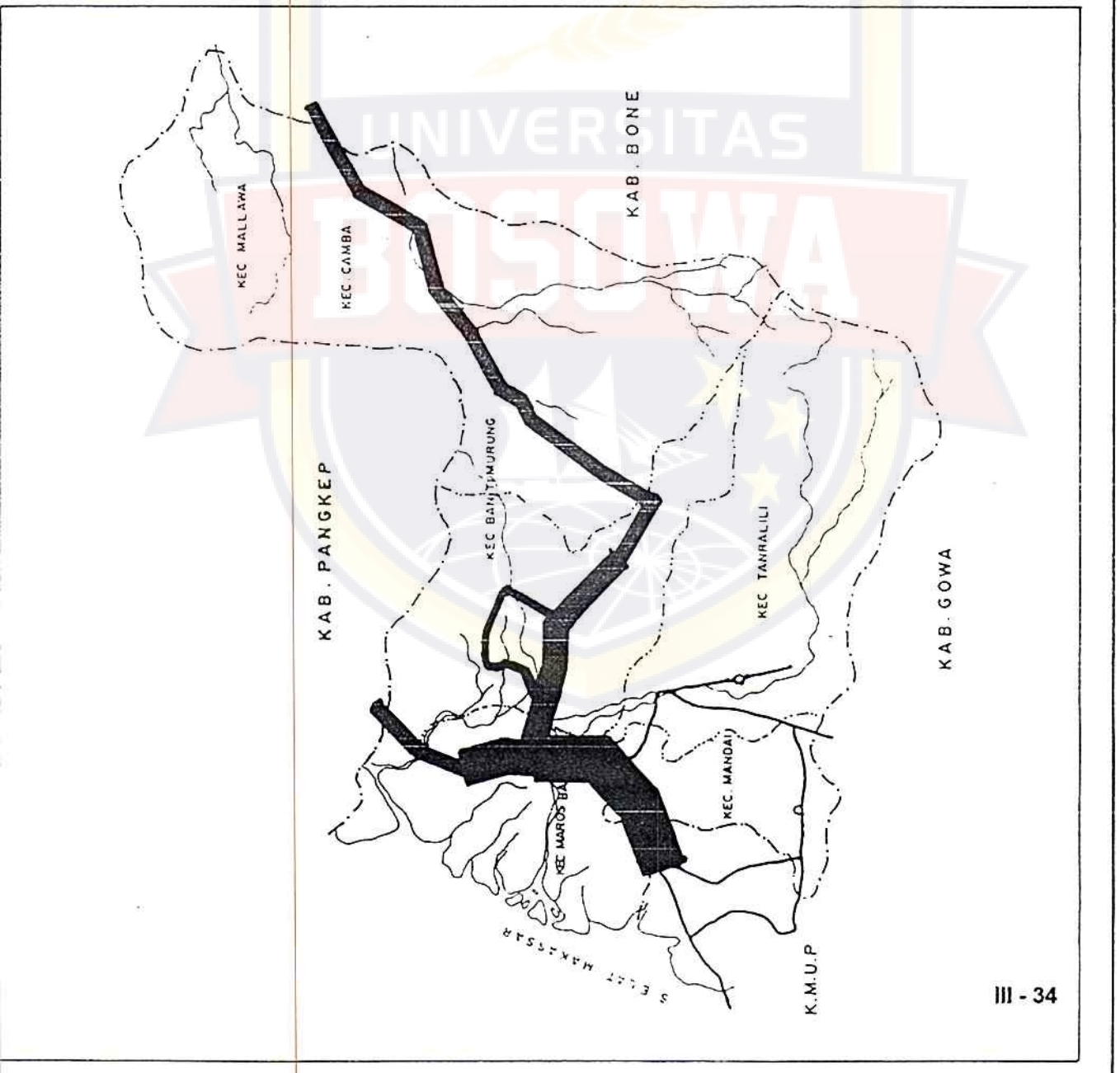
MAHASISWA / NO. POKOK
 SUGENG PRESTIHARYONO
 45 86 04 0561 / 87 113 4505

DOSEN PEMBIMBING
 PARAF
 Ir. H. AMBO ENRE BS, MSi
 Drs. ABD. AZIS MATTOLA, M.S.P
 Ir. BURHANUDDIN BADRUN

SKALA 1 : 300.000

Sumber : - Dinas LLAJR

JURUSAN PLANOLOGI
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS "45"

BAB IV FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGAN KOTA MAROS

Pada bagian terdahulu, telah diuraikan bahwa penduduk beserta kegiatan fungsionalnya adalah dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu kota. Faktor penduduk dapat ditinjau dari segi jumlah, kepadatan dan penyebarannya, struktur umur penduduk, serta mata pencaharian penduduknya.

Sedangkan kegiatan fungsional kota secara fisik dapat diwujudkan oleh penggunaan lahan yang meliputi, kegiatan perkotaan berupa perumahan, pendidikan, perdagangan, pertanian, industri, transportasi, dan lain-lain.

Kedua faktor utama perkembangan kota tersebut mempunyai hubungan yang saling kait mengkait, di mana faktor penduduk merupakan unsur permintaan dan faktor kegiatan fungsional sebagai perwujudan usaha manusia sebagai unsur penyedia.

Faktor penduduk membutuhkan perumahan, pekerjaan, jasa pelayanan, dan komunikasi. Sedangkan semua kebutuhan tersebut terorganisasi dengan segala prasarana dalam distribusi ruang. Hubungan timbal balik kedua faktor tersebut akan terus berlanjut selama perkembangan penduduk juga meningkat. Penduduk selalu mencari jalan keluar bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari secara optimal. Dengan demikian kegiatan fungsional kota terus berkembang pula.

Oleh karena itu dalam bab ini, akan dikemukakan suatu rumusan yang merupakan rangkaian dari hasil uraian tahap-tahap sebelumnya. Maka dalam upaya mencapai hasil yang diharapkan, akan diberikan dasar pertimbangan untuk penilaian perkembangan Kota Maros, antara lain:

- penentuan unit penelitian
- peninjauan tingkat perkembangan
- mengukur tingkat perkembangan

4.1 Penentuan Unit Penelitian

Penentuan unit penelitian dalam studi ini, dibatasi berdasarkan kekuatan yang timbul dari dalam Kota Maros itu sendiri (faktor internal). Dengan demikian untuk menentukan faktor-faktor perkembangan yang akan dikembangkan sebagai bahan penelitian, yaitu berdasarkan fungsi dan peran Kota Maros yang dimilikinya, mencakup penduduk dan kegiatan fungsionalnya. Oleh karena penduduk merupakan objek sekaligus subjek dari kegiatan perkotaan, maka dalam penelitian ini akan dikaji hubungan antara penduduk dengan kegiatan-kegiatan fungsional kota sebagai faktor utama yang berperan dalam mempengaruhi perkembangan Kota Maros.

Dengan demikian kegiatan fungsional di Kota Maros yang akan diteliti tingkat perkembangannya adalah kegiatan perumahan, pendidikan, perdagangan, industri, pertanian, dan transportasi. Dalam penelitian ini, keenam kegiatan tersebut merupakan jenis kegiatan yang dipandang dapat mewakili dari keseluruhan kegiatan fungsional yang sedang berlangsung di Kota Maros dan memiliki peranan yang dominan dalam menentukan perkembangan kotanya.

4.2 Penelitian Faktor-Faktor Perkembangan

Salah satu pengamatan yang dilakukan terhadap perkembangan Kota Maros adalah dengan cara mengukur faktor-faktor perkembangan yang telah dilakukan sebelumnya. Faktor-faktor perkembangan yang dinilai berdasarkan kepada variabel yang digunakan sebagai pengukur potensi kota. Oleh karena itu pada bagian ini akan diuraikan tentang penentuan variabel perkembangan dan

metode penelitian yang akan digunakan.. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui variabel-variabel yang mempengaruhi faktor-faktor perkembangan Kota Maros.

4.2.1 Penentuan Variabel-Variabel Perkembangan Kota Maros

Penentuan variabel-variabel perkembangan ini dimaksudkan sebagai bahan penelitian terhadap faktor-faktor perkembangan Kota Maros nantinya.

A. Kegiatan Perumahan

Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka penambahan akan fasilitas perumahan akan meningkat pula, sehingga perubahan pada pola tata guna lahan akan menyertainya. Perubahan ini terjadi karena pembangunan perumahan akan menempati lahan-lahan yang belum terbangun. Dari seluruh luas Kota Maros, 21,62 % adalah merupakan kawasan belum terbangun, sehingga perkembangan perumahan memiliki prospek yang cukup baik.

Ditinjau dari segi pertumbuhannya, pembangunan perumahan umumnya dilakukan oleh masyarakat/perorangan, sehingga perkembangannya cenderung secara alami. Di mana pola kawasan perumahan ada yang mengelompok pada suatu kawasan, ada pula yang berkembang secara linier mengikuti perkembangan jaringan jalan.

Sedangkan apabila ditinjau dari segi penyediaan rumah bagi penduduk yang ada, dengan asumsi 1 (satu) unit rumah dihuni oleh 5 (lima) orang, maka dengan jumlah penduduk sebesar 48.464 jiwa, dibutuhkan 9.694 unit rumah. Dan apabila dibandingkan dengan jumlah rumah yang telah ada yaitu 9.869 unit, maka di Kota Maros sudah memenuhi kebutuhan perumahan, bahkan kelebihan rumah sebanyak 175 unit.

B. Kegiatan Pendidikan

Kegiatan pendidikan dalam sistem kegiatan perkotaan mempunyai nilai kemasyarakatan. Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa dan pendidikan membentuk serta menambah pengetahuan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan cepat dan tepat, sebab semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula tingkat produktivitasnya. Dengan demikian kegiatan pendidikan sebagai sarana pelayanan umum kehadirannya diharuskan di setiap kawasan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan pernyataan di atas, dengan tujuan yang sama maka kegiatan pendidikan yang berlangsung di Kota Maros terbagi dalam dua jenis, yaitu pendidikan umum dan agama (negeri dan swasta) yang mencakup pendidikan dasar dan menengah. Di samping itu terdapat pula perguruan tinggi berupa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sekolah Tinggi Agama, dan Akademi Perdagangan.

Ditinjau dari segi pelayanannya, fasilitas pendidikan penyebarannya belum merata pada setiap kelurahan khususnya untuk tingkat SLTP dan SLTA, akan tetapi jangkauan pelayanan bukan merupakan hambatan karena pelayanan dalam sistem perangkutan baik dan lancar, serta jarak tempuh ke lokasi-lokasi fasilitas pendidikan tersebut relatif dekat dari kawasan pemukiman penduduk yang membutuhkannya.

Di samping itu, keberadaan Sekolah/Perguruan Tinggi merupakan daya tarik Kota Maros bagi penduduk yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik yang berasal dari Kota Maros itu sendiri, maupun yang berasal dari kecamatan dan kabupaten yang berada disekitarnya.

Pada umumnya, kegiatan pendidikan perkembangannya cenderung didasarkan pada mutu di bidang kegiatan belajar mengajar itu sendiri, seperti jumlah fasilitas, ruang belajar, dan jumlah guru yang memadai memungkinkan bertambah besarnya minat masyarakat untuk memilih sekolah yang mutunya lebih baik, sehingga mampu mendorong perkembangan penduduk tidak hanya pada kelurahan yang ada dalam wilayah Kota Maros tetapi juga di sekitar kabupaten pada umumnya berorientasi ke Kota Maros, khususnya untuk pendidikan SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi.

C. Perdagangan

Sarana kegiatan perdagangan di Kota Maros berupa pasar, toko, dan kios/warung mempunyai fungsi sebagai pusat perbelanjaan yang menyediakan keperluan sehari-hari seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, beras, tepung, pakaian/bahan pakaian, barang kelontong, bahan bangunan, alat pertukangan, alat-alat sekolah/kantor, alat/perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Selain itu berfungsi juga sebagai sarana pelengkap seperti bengkel kendaraan bermotor/reparasi alat-alat elektronik, alat-alat listrik/penerangan, dan lain sebagainya.

Ketiga jenis kegiatan perdagangan tersebut, mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi Kota Maros karena mempunyai lingkup yang lebih luas kepada jangkauan pelayanan daerah sekitarnya. Dan dengan adanya pasar induk yang terletak pada sisi jalur jalan regional mampu memenuhi kebutuhan penduduk sekaligus memasarkan hasil-hasil pertanian daerah belakangnya. Perkembangan kegiatan perdagangan itu sendiri sangat ditentukan oleh intensitas dari jenis kegiatan dengan daya dukung masyarakat yang membelinya. Kegiatan perdagangan di Kota Maros umumnya merupakan kegiatan usaha penduduk selain pertanian dan industri.

D. Kegiatan Industri

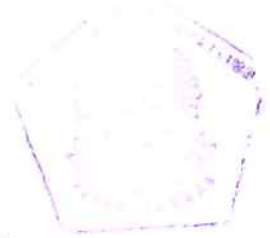
Kegiatan industri yang diusahakan penduduk di Kota Maros meliputi industri makanan dan minuman, perabotan rumah tangga dan industri ringan lainnya. Ditinjau dari jenis industri yang ada terlihat bahwa kegiatan industri di Kota Maros masih bersifat industri ringan dan tidak memerlukan lahan yang luas karena pada umumnya penduduk melakukan kegiatan tersebut dirumah-rumah di mana mereka tinggal. Dilain pihak kegiatan industri lebih mengutamakan pelayanan ekonomi bagi masyarakat, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja. Sedangkan hasil produksi dari kegiatan industri secara kualitas, belum bisa ditentukan, sebab data yang diperlukan tidak ada.

B. Kegiatan Pertanian

Kegiatan pertanian merupakan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Maros. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan kelangsungan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat dilihat dari segi pemilikan lahan, walaupun pada keadaan dimasa yang akan datang adanya suatu usaha-usaha ke arah pergeseran diversifikasi mata pencaharian akan semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa pemilikan dan penguasaan lahan pertanian merupakan alternatif satu-satunya yang tetap dominan.

F. Kegiatan Transportasi

Kota Maros pada saat ini, dapat dikategorikan sebagai kota yang mempunyai sarana dan prasarana perhubungan darat yang cukup baik. Sebab hampir seluruh wilayahnya dapat dijangkau oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Sedangkan daerah-daerah yang belum terjangkau oleh kendaraan roda empat pada umumnya berada di daerah-daerah yang menuju/dekat atau berbatasan dengan wilayah Kota Maros, namun dapat ditempuh dengan



menggunakan kendaraan roda dua, dengan kondisi jalan dari tanah dan jembatan-jembatan darurat.

Gambaran mengenai kondisi sistem pergerakan barang dan orang dalam dan keluar Kota Maros di atas, menunjukkan bahwa jaringan jalan yang ada memegang peranan yang sangat penting. Sebab jaringan jalan tersebut dapat dijadikan patokan sebagai bentuk dan struktur kota, serta berfungsi sebagai jembatan antara satu pusat kegiatan dengan pusat-pusat kegiatan lainnya dalam wilayah Kota Maros maupun dengan daerah sekitarnya. Dengan kata lain, pergerakan akan timbul jika terdapat hubungan antara kedua aktifitas tersebut. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa lalu lintas yang bergerak di atas jaringan jalan adalah fungsi dari kegiatan.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat kaitan yang erat antara perkembangan kota dengan tersedianya prasarana jalan raya dari pelayanan jasa distribusi. Oleh karena itu pola suatu jaringan jalan dapat dijadikan ukuran dari suatu pola kota dan akan merupakan alat kontrol dari suatu perkembangan kota.

Dari uraian-uraian pada sub bab 4.2 secara keseluruhan di atas, maka variabel-variabel yang akan digunakan meliputi:

- Kegiatan perumahan : luas daerah
jumlah rumah
jumlah rumah standar
- Kegiatan pendidikan : jumlah sekolah
jumlah murid
jumlah guru
- Kegiatan perdagangan : jumlah toko

- Kegiatan industri : jumlah kios/warung
: jumlah industri
: jumlah tenaga kerja
- Kegiatan pertanian : luas daerah
: luas lahan sawah
: jumlah lahan kering
: jumlah petani
- Kegiatan transportasi : panjang jalan propinsi
: panjang jalan kabupaten
: panjang jalan desa

4.2.2 Metode Penilaian Faktor-Faktor Perkembangan Kota Maros

Setelah diketahui variabel-variabel yang akan digunakan sebagai bahan penilaian, maka pada bagian ini akan dikemukakan suatu metode penilaian yang akan digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan Kota Maros. Unit penelitiannya dilakukan dengan tiga tahap, yaitu:

A. Tahap Pertama

Dilakukan pengukuran tingkat perkembangan dengan cara membagi setiap variabel jenis kegiatan yang sesuai dengan karakteristik perkembangannya. Pengukuran ini gunanya untuk mengetahui persepsi jumlah penduduk terhadap jenis kegiatan yang dilakukan, meliputi jangkauan pelayanan setiap jenis kegiatan tersebut terhadap penduduk dan bagaimana pengaruhnya suatu tempat dapat memberikan manfaat terhadap penduduknya. Hasil dari pengukuran ini dapat ditunjukkan berupa angka variabel.

B. Tahap Kedua

Melakukan penilaian dari hasil tahap pertama. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan metode indeks. Adapun penggunaan metode ini adalah dengan mentransformasikan setiap nilai dasar variabel menjadi nilai indeks.

Dalam mentransformasikan setiap angka variabel menjadi nilai indeks atau bobot, setiap kelurahan yang mempunyai angka variabel tertinggi diberi nilai 1000. Selanjutnya untuk menentukan nilai indeks kelurahan lainnya adalah dengan menggunakan rumus-rumus (Anto Dayan, 1978: 215):

$$NI = \frac{P_n}{P_1} \times 1000$$

Dimana: NI = Nilai indeks setiap variabel

P_n = Nilai dasar variabel

P_1 = Nilai dasar variabel tertinggi

C. Tahap Ketiga

Setelah seluruh variabel ditransformasikan dari angka variabel ke nilai indeks, kemudian indeks ini dikelompokkan ke dalam dua kelas, yaitu tinggi dan rendah dengan rumus (Dixon and Massey Jr., 1969: 139):

$$Y = \frac{X_1 - X_0}{n}$$

Dimana:

Y = Interval masing-masing tingkatan

X_1 = Nilai indeks tertinggi

X_0 = Nilai indeks terendah

N = Banyaknya kelas

Dengan cara perhitungan seperti itu, akan didapat kelompok seperti berikut:

rendah : $r = X_0 + Y$

tinggi : $t = r + Y$

Pengelompokan ini gunanya untuk mengetahui variabel-variabel yang dapat memberikan pengaruh yang kuat atau lemah terhadap perkembangan Kota Maros. Jadi variabel yang berada pada kelompok perkembangan tinggi mempunyai pengaruh terhadap perkembangan kota lebih kuat begitu pula sebaliknya, sedangkan untuk memudahkan perbedaan antara batas bawah dan batas atas setiap penilaian diambil nilai tengah di mana batas atas penilaian tingkat perkembangan yang rendah merupakan batas bawah penilaian tingkat perkembangan yang tinggi.

4.3 Analisis Tingkat Perkembangan

Pada bagian sebelumnya, telah ditentukan faktor-faktor perkembangan yang akan dijadikan dasar untuk melihat tingkat perkembangan Kota Maros. Dari faktor-faktor yang dinilai menunjukkan tingkat perkembangan yang tinggi dan rendah.

4.3.1 Kegiatan Perumahan

Perkembangan perumahan adalah merupakan perwujudan dari perkembangan sosial dan ekonomi penduduknya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan terhadap perumahan akan meningkat, akan tetapi penyediaan perumahan tergantung kepada tersedianya lahan kota. Dengan demikian berkembangnya jumlah penduduk maka akan berkembang pula penggunaan lahan untuk perumahan dan kegiatan-kegiatan non perumahan yang berorientasi pada kegiatan perumahan, sehingga perkembangan

selanjutnya mempunyai dua kemungkinan, yaitu menetap pada lahan semula atau bergeser mencari lahan kosong yang umumnya berada di pinggiran kota.

Oleh karena itu, kegiatan perumahan perkembangannya ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah rumah yang ada, maka penilaiannya akan meliputi:

- a. Jumlah penduduk terhadap luas daerah, yang biasa disebut dengan kepadatan penduduk. Tingginya angka kepadatan penduduk ini akan memperlihatkan berkembangnya suatu daerah perumahan, maka angka variabel tertinggi dinilai 1000.

Hasil penilaian dari kegiatan perumahan ini diklasifikasikan sebagai berikut:

Kepadatan Penduduk

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 438,67 - 561,34
- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 561,34 – 1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas, menunjukkan bahwa umumnya kelurahan mempunyai tingkat perkembangan yang rendah, kecuali Kelurahan Alliritengae yang mempunyai tingkat perkembangan tinggi (Lampiran A.2 kolom 3).

- b. Jumlah rumah yang ada terhadap jumlah rumah yang seharusnya ada. Untuk itu angka variabel tertinggi dinilai 1000.

Jumlah Rumah

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 133,55 - 866,45
- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 866,45 – 1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas menunjukkan bahwa umumnya kelurahan memiliki tingkat perkembangan rendah, kecuali Kelurahan Alliritengae yang memiliki tingkat perkembangan tinggi (Lampiran A.2 kolom ke-4).

4.3.2 Kegiatan Pendidikan

Perkembangan Kegiatan pendidikan sangat bergantung kepada orientasi penduduk terutama pada jumlah pendidikan dengan mutu yang baik. Walaupun mutu pendidikan itu sifatnya relatif, artinya tergantung pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah yang bersangkutan, tetapi apabila jumlah murid yang ada melebihi daya tampung sekolah yang tersedia sedangkan sekolah yang lain memiliki jumlah murid yang cukup, mudah dapat dikatakan bahwa mutu sekolah itu baik. Karena mutu sekolah yang baik tidak terlepas dari jumlah guru yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada murid-muridnya. Akan tetapi mutu di sini tidak ditujukan pada sekolah yang ada di Kota Maros melainkan untuk melihat berapa besar kualitas dan kuantitas penduduk menurut tingkat pendidikannya. Untuk itu penilaiannya akan meliputi:

- a. Jumlah fasilitas terhadap jumlah penduduk, maksudnya adalah untuk mengetahui berapa besar jangkauan pelayanannya terhadap penduduk. Maka penilaiannya didasarkan pada kelurahan yang memiliki angka variabel tertinggi dinilai 1000.

Tingkat Taman Kanak-Kanak

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 333,34 - 666,67
- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 666,67 – 1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas diperoleh bahwa Kelurahan Alliritengae memiliki tingkat perkembangan tinggi, sedangkan Kelurahan Allepolea memiliki tingkat perkembangan rendah (Lampiran B.2 kolom ke-2).

Tingkat Sekolah Dasar

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 71,43 - 928,57
- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 928,57 – 1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas diperoleh bahwa umumnya kelurahan memiliki tingkat perkembangan tinggi, hanya Kelurahan Bajubodoa yang memiliki tingkat perkembangan rendah (Lampiran B.2 kolom ke-3).

Tingkat Sekolah Lanjutan Pertama

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 416,67 - 583,34
- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 583,34 – 1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas diperoleh bahwa Kelurahan Alliritengae memiliki tingkat perkembangan tinggi sedangkan Kelurahan Pettuadae, Bajubodoa, dan Allepolea mempunyai tingkat perkembangan rendah (Lampiran B.2 Kolom ke-4).

Tingkat Sekolah Lanjutan Atas

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 250,00-750,00
- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 750,00-1000

Hasil penilaian tingkat perkembangan di atas diperoleh bahwa Kelurahan Alliritengae memiliki tingkat perkembangan tinggi, sedangkan Kelurahan Bajubodoa dan Allepolea memiliki tingkat perkembangan rendah (Lampiran B.2 kolom ke-5).

- b. Jumlah murid terhadap jumlah penduduk, hal ini gunanya untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk Kota Maros. Maka angka variabel tertinggi dinilai 1000.

Tingkat Taman Kanak-Kanak

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 405,41 - 594,60
- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 594,60 – 1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas diperoleh bahwa Kelurahan Alliritengae memiliki tingkat perkembangan tinggi, sedangkan

Kelurahan Allepolea memiliki tingkat perkembangan rendah (Lampiran B.2 kolom ke-6).

Tingkat Sekolah Dasar

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 82,21-917,79
- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 917,79-1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas diperoleh bahwa Kelurahan Boribellaya memiliki tingkat perkembangan tinggi, sedangkan Kelurahan Bajubodoa, Allepolea dan Kelurahan Pettuadae memiliki tingkat perkembangan rendah (Lampiran B.2 kolom ke-7).

Tingkat Sekolah Lanjutan Pertama

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 490,76 - 509,25
- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 509,25 – 1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Alliritengae dan Allepolea memiliki perkembangan yang tinggi, sedangkan Kelurahan Pettuadae dan Kelurahan Bajubodoa memiliki tingkat perkembangan rendah (Lampiran B.2 kolom ke-8).

Tingkat Sekolah Lanjutan Atas

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 297,48 - 702,53

- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 702,53 – 1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas diperoleh bahwa Kelurahan Alliritengae mempunyai tingkat perkembangan tinggi, sedangkan Kelurahan Allepolea dan Bajubodoa mempunyai tingkat perkembangan rendah (Lampiran B.2 kolom ke-9).

- c. Perkembangan guru terhadap penduduk, penilaian ini dilakukan karena peranan guru dalam meningkatkan tingkat pendidikan penduduk ditentukan oleh jumlah guru yang ada. Untuk itu angka variabel tertinggi dinilai 1000.

Tingkat Taman Kanak-Kanak

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 409,09 - 590,91
- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 590,91 – 1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas diperoleh bahwa Kelurahan Alliritengae mempunyai tingkat perkembangan tinggi, sedangkan kelurahan yang mempunyai tingkat perkembangan yang rendah adalah Kelurahan Allepolea (Lampiran B.2 kolom ke-10).

Tingkat Sekolah Dasar

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 132,81 - 867,19
- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 867,19 – 1000



Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Alliritengae, Pettuadae, dan Allepolea yang memiliki tingkat perkembangan tinggi, sedangkan kelurahan yang mempunyai tingkat perkembangan rendah berada pada Kelurahan Bajubodoa dan Boribellaya (Lampiran B.2 kolom ke-11).

Tingkat Sekolah Lanjutan Pertama

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 495,8 - 504,20
- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 504,20 – 1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Alliritengae dan Allepolea memiliki tingkat perkembangan tinggi, sedangkan kelurahan yang memiliki tingkat perkembangan rendah adalah Kelurahan Pettuadae dan Bajubodoa (Lampiran B.2 kolom ke-12).

Tingkat Sekolah Lanjutan Atas

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 335,82 - 664,18
- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 664,18 – 1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Alliritengae mempunyai tingkat perkembangan tinggi, sedangkan Kelurahan Allepolea dan Bajubodoa mempunyai tingkat perkembangan rendah (Lampiran B.2 kolom ke-13).

4.3.3 Kegiatan Perdagangan

Fasilitas perdagangan yang terdapat di Kota Maros dapat dibedakan berupa pasar, toko, dan kios/warung. Ketiga fasilitas perdagangan ini perbedaannya adalah toko umumnya berlokasi menyebar dan mengikuti jaringan jalan, demikian pula halnya dengan kios/warung, sedangkan pasar berada pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Walaupun demikian ketiga jenis fasilitas perdagangan yang ada di Kota Maros sulit dibedakan dalam hal jenis yang diperdagangkan, tetapi untuk toko cenderung menjual barang yang tidak semua penduduk membutuhkannya setiap hari, tetapi pasar cenderung menjual kebutuhan pokok sehari-hari berupa hasil-hasil dari kegiatan pertanian.

Oleh karena itu, penilaian kegiatan perdagangan didasarkan kepada jumlah penduduk yang dilayani terhadap jangkauan fasilitas perdagangan. Maka penilainnya yang menunjukkan angka tertinggi akan dinilai 1000. Karena makin besar jumlah penduduk yang dilayani makin besar pengaruhnya terhadap perkembangan kota.

Hasil penilaian dari kegiatan perdagangan diklasifikasikan sebagai berikut:

Jumlah Toko

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 483,87 - 516,13
- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 516,13 – 1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas ternyata bahwa Kelurahan Alliritengae yang memiliki tingkat perkembangan tinggi. Sedangkan Kelurahan Allepolea, Bajubodoa, Pettuadae, dan Boribellaya memiliki tingkat perkembangan yang rendah (Lampiran C.2 kolom ke-2).

Jumlah Kios/Warung

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 487,54 - 512,46
- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 512,46 – 1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas menunjukkan bahwa umumnya kelurahan memiliki tingkat perkembangan rendah, kecuali kelurahan Alliritengae yang memiliki tingkat perkembangan yang tinggi (Lampiran C.2 kolom ke-3).

4.3.4 Kegiatan Industri

Perkembangan kegiatan industri di suatu kota bertujuan untuk dapat lebih meningkatkan kegiatan kotanya. Kegiatan industri itu sendiri, perkembangannya dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja dan jumlah industri yang ada.

Apabila ditinjau dari perkembangannya, kegiatan industri dapat dikatakan berkembang apabila mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Oleh karena itu dalam penilaian kegiatan industri di Kota Maros akan meliputi:

- a. Jumlah tenaga kerja terhadap jumlah industri, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar jumlah industri mampu menyerap tenaga kerja, sebab semakin banyak tenaga kerja yang dapat diserap oleh suatu industri, semakin besar perkembangan kegiatan industrinya, sehingga penilaiannya didasarkan kepada angka variabel tertinggi dinilai 1000.

Jumlah industri

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 89,84 - 910,16

- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 910,16 – 1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas menunjukkan bahwa kelurahan Boribellaya dan Allepolea yang mempunyai tingkat perkembangan tinggi, sedangkan Kelurahan Alliritengae, Bajubodoa dan Pettuadae yang mempunyai tingkat perkembangan rendah (Lampiran D.2 kolom ke-2).

- b. Jumlah tenaga kerja terhadap jumlah penduduk, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar jumlah penduduk yang bekerja pada sektor industri. Maka dinilai 1000 bagi angka variabel tertinggi. Hasil penilaiannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Jumlah Tenaga Kerja

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 335,26 - 664,78
- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 664,78 – 1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas menunjukkan bahwa umumnya kelurahan mempunyai tingkat perkembangan yang rendah, kecuali Kelurahan Boribellaya yang mempunyai tingkat perkembangan tinggi (Lampiran D.2 kolom ke-3).

4.3.5 Kegiatan Pertanian

Ditinjau dari luas lahan pertanian di Kota Maros, masih dapat memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi penduduk yang mengabdikan diri sebagai petani dan mengusahakan sendiri hasil pertanian sebagai usaha peningkatan kegiatan ekonomi penduduknya. Lebih jauh lagi lahan pertanian di Kota Maros

merupakan modal bagi pemiliknya. Oleh karena itu pengamatannya akan meliputi:

- a. Luas lahan sawah terhadap luas daerah, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui rasio luas yang dapat memberikan pengaruhnya terhadap kegiatan pertanian. Maka luas lahan pertanian dapat mencerminkan adanya suatu kegiatan pertanian, sehingga penilaiannya didasarkan kepada luas lahan pertanian yang mempunyai angka variabel tertinggi dinilai 1000. Hasil penilaian dari kegiatan pertanian diklasifikasikan sebagai berikut:

Luas Lahan Sawah

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 380,26 - 619,74
- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 619,74 – 1000

Dari hasil analisis intensitas penggunaan lahan di atas menunjukkan bahwa intensitas penggunaan lahan pertanian yang tinggi berada pada Kelurahan Allepolea dan Pettuadae. Sedangkan intensitas penggunaan lahan pertanian yang rendah berada pada Kelurahan Bajubodoa, Alliritengae, dan Boribellaya (Lampiran E.2 kolom ke-2).

Demikian pula untuk penggunaan lahan kering di Kota Maros dapat diuraikan sebagai berikut:

Luas Lahan Kering

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 156,85 - 843,15

- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 843,15 – 1000

Dari hasil analisis perkembangan intensitas penggunaan lahan kering di atas, terlihat bahwa Kelurahan Bajubodoa, Alliritengae, dan Boribellaya memiliki intensitas penggunaan lahan kering yang tinggi, sedangkan Kelurahan Allepolea dan Kelurahan Pettuadae memiliki intensitas penggunaan lahan rendah (Lampiran E.2 kolom ke-3).

- b. Jumlah petani terhadap jumlah penduduk, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar rasio penduduk yang bekerja sebagai petani. Maka penilaiannya didasarkan kepada angka variabel tertinggi dinilai 1000.

Jumlah Petani

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 484,43 - 515,57
- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 515,57 – 1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk yang bekerja pada sektor pertanian yang memiliki tingkat perkembangan tinggi berada pada Kelurahan Bajubodoa. Sedangkan kelurahan yang mempunyai tingkat perkembangan rendah adalah Kelurahan Alliritengae, Pettuadae, Allepolea, dan Boribellaya (Lampiran E.2 kolom ke-4).

4.3.6 Kegiatan Transportasi

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa jaringan jalan merupakan suatu kerangka kota dan sebagai ukuran berkembangnya suatu kota. Oleh

karena itu penilaiannya langsung didasarkan pada panjang jalan yang dimiliki setiap kelurahan.

Hasil penilaian kegiatan transportasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Jalan Propinsi

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 410,72 - 589,29
- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 589,29 – 1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas, diperoleh bahwa hanya Kelurahan Pettuadae yang memiliki tingkat perkembangan tinggi, sedangkan Kelurahan Boribellaya, Allepolea, dan Alliritengae yang memiliki tingkat perkembangan rendah (Lampiran F.1 kolom ke-2).

Jalan Kabupaten

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 340,60 - 659,41
- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 659,41 – 1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas diperoleh bahwa Kelurahan Alliritengae yang memiliki tingkat perkembangan tinggi dan Kelurahan Bajubodoa yang memiliki tingkat perkembangan rendah (Lampiran F.1 kolom ke-3)

Jalan Desa

- Tingkat perkembangan rendah, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 386,37 - 613,64
- Tingkat perkembangan tinggi, yaitu kelurahan dengan nilai indeks akhir 613,64 – 1000

Dari hasil penilaian tingkat perkembangan di atas diperoleh bahwa Kelurahan Allepolea, Boribellaya, Bajubodoa, dan Alliritengae yang mempunyai tingkat perkembangan tinggi, sedangkan Kelurahan Pettuadae mempunyai tingkat perkembangan rendah (Lampiran F.1 kolom ke-4).

Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat perkembangan kegiatan-kegiatan fungsional di Kota Maros secara keseluruhan dapat dilihat pada lembaran lampiran, yaitu pada lampiran H dan G.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dan pembahasan secara keseluruhan mengenai perkembangan Kota Maros, akhirnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Terkonsentrasinya beberapa kegiatan fungsional kota di satu kelurahan, dalam hal ini adalah Kelurahan Alliritengae, mengakibatkan perkembangan penduduk di Kota Maros penyebarannya tidak merata pada setiap kelurahan. Kondisi seperti ini disebabkan karena penduduk Kota Maros dalam memilih lokasi/mendirikan tempat tinggal cenderung mendekati pusat-pusat kegiatan fungsional kotanya. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan fungsional kota sangat berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan pergerakan penduduk. Demikian pula sebaliknya, pertumbuhan penduduk telah membawa konsekwensi terhadap peningkatan dan pemusatan kegiatan-kegiatan fungsional kotanya. Jadi dapat dikatakan bahwa kedua faktor tersebut, memiliki keterkaitan yang sangat kuat satu dengan yang lainnya dalam mempengaruhi perkembangan di setiap kelurahan yang ada pada khususnya dan terhadap perkembangan Kota Maros pada umumnya.
2. Dari keseluruhan hasil penilaian yang telah dilakukan diperoleh bahwa umumnya kegiatan-kegiatan fungsional di Kota Maros memiliki tingkat perkembangan yang masih rendah, kecuali kegiatan transportasi yang memiliki tingkat perkembangan tinggi.

5.2. Saran-Saran

Dalam upaya mengoptimalkan potensi dan mengantisipasi masalah perkembangan di Kota Maros, maka pada bagian ini dikemukakan saran-saran, yaitu:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Maros, dalam rangka perencanaan pembangunan Kota Maros (Ibukota Kabupaten Maros) di masa-masa mendatang hendaknya memperhatikan pemerataan kegiatan perkotaan, baik kegiatan sosial maupun ekonomi pada kelurahan-kelurahan yang ada sesuai dengan fungsi, potensi dan masalah yang dimiliki, hal ini dimaksudkan agar setiap kelurahan dapat menyelenggarakan fungsi dan peran yang diembannya, serta untuk mengurangi beban pusat kota agar tidak terjadi penurunan kualitas tingkat pelayanan terhadap penduduk yang ada di sekitarnya. Di samping itu juga untuk mencegah terkonsentrasinya penduduk di satu kelurahan, dalam hal ini Kelurahan Alliritengae.
2. Sedangkan untuk pengembangan fisik Kota Maros saat ini dan dimasa yang akan datang, baik untuk penyediaan fasilitas perumahan maupun fasilitas umum kotanya sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan fungsional kota, hendaknya tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang Kota Maros yang telah ditetapkan, baik melalui pengawasan/perijinan ataupun tindakan penertiban.
3. Bagi mahasiswa dan ilmuwan yang akan mengerjakan tugas akhir atau karya ilmiah, dapat menyempurnakan hasil studi ini, yang mana dapat diteliti tentang studi arahan penggunaan lahan di Kota Maros, studi indentifikasi faktor-faktor perkembangan Kota Maros yang berasal dari faktor eksternal kota, aspek kelembagaan, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim, 1992. *Buku Kompilasi Data*, Revisi Rencana Umum Tata Kota Ibukota Kabupaten Maros, Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
2. Anonim, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.
3. Anonim, 1974. *Urban Developmen Strategis in The Context of Regional Developmen*, Report of The Seminar Helt at Nagoya, Japan, 18 Oktober-8 November.
4. Adisasmita, R., 1987. *Kajian Teori Simpul Jasa Distrik Ditinjau dari Jalur Perdagangan, Studi Kasus; Sulawesi Selatan*, Universitas Hasanuddin, Ujungpandang.
5. Antaprawira, YH., 1976. *Penentuan Titik Pembuka Perkembangan Daerah Jawa Barat Bagian Selatan*, Departemen Planologi, ITB Bandung.
6. Chapin Jr., FS., 1957. *Urban Land Use Planning*, Harper and Brothers, Publishers, New York.
7. Dayan, Anto, 1978. *Pengantar Metode Statistik*, Jilid I L P3ES, Jakarta.
8. Daldjoeni, N., 1987 *Geografi Kota dan Desa*, Alumni, Bandung.
9. Dixon, WJ. And Massey, FJ., 1969. *Introduction to Statistical Analysis*, Mc. Graw Hill, Kogashuka Ltd., Tokyo.
10. Gould, Adams, and Abler, 1972. *Spatial Organization*, Prentice Hall, Inc., London.
11. Hadiwinoto, Suhadi, 1981. *Beberapa Pemikiran Tentang Rencana dan Perkembangan Kota*, Widyapura, No. 6 tahun III.

12. Hajisarosa, Purnomosidi, 1980. *Konsep Dasar Pengembangan Indonesia*, Makalah Pada Simposium Prosedur dan Teknik Perencanaan Pengembangan Wilayah, 21-23 Agustus, Bandung.
13. Jayadinata, JT., 1986. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*, ITB, Bandung.
14. Mc. Gee, TG., 1976. *The South East Asian City*, G. Bell and Son Ltd., London.
15. Ratcliffe, Jhon, 1974. *An Introduction to Town and Country Planning*, Hutchinson and Co. Ltd., London.
16. Rustam, Uton, dkk., 1978. *Perkembangan Kota serta Kehidupan Perkotaan di Indonesia*, Departemen Planologi Institut Teknologi Bandung, Bandung.
17. Sujarto, Djoko, 1976. *Pendekatan Pembangunan Perkotaan Ditinjau dari Segi Pembangunan Regional*, Bahan Kuliah pada Kursus Perencanaan Sosial Pembangunan Kota III, 4 Oktober - 4 November.
18. Sujarto, Djoko, 1976. *Konsep-Konsep Perencanaan Pembangunan Perkotaan serta Perkembangannya*, Departemen Tata Pembangunan Daerah dan Kota, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
19. Sujarto, Djoko, 1980. *Faktor-Faktor di dalam Proses Perluasan Wilayah Kota*, Jurusan Planologi, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
20. Tjokroamidjoyo, B., 1980. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
21. Watts, Kenneth, 1976. *Peninjauan Keadaan Kota*, Tata Pembangunan Daerah dan Kota, Institut Teknologi Bandung, Bandung.



Lampiran A
Penilaian Kegiatan Perumahan

No	Kelurahan	Luas Daerah (Ha)	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Standar
1	Alliritengae	1.015	12.001	3.038	2.400
2	Boribellaya	3.772	5.453	1.032	1.091
3	Pettuadae	2.815	11.343	2.105	2.269
4	Bajubodoa	3.324	11.385	2.140	2.277
5	Allepolea	2.415	8.282	1.554	1.657
Jumlah		13.341	48.464	9.869	9.694

Sumber : - Tabel 3.2
- Hasil Perhitungan

Lampiran A.1
Angka Variabel Kegiatan Perumahan

No	Kelurahan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)	Jumlah Rumah terhadap Jumlah Rumah Standar
1	Alliritengae	11,82	1,2658
2	Boribellaya	1,45	0,9459
3	Pettuadae	4,03	0,9277
4	Bajubodoa	3,43	0,9398
5	Allepolea	3,43	0,9378
Jumlah		24,16	5,0170

Sumber : - Hasil Perhitungan

Lampiran A.2
Indeks Variabel Kegiatan Perumahan

No	Kelurahan	Kepadatan Penduduk	Jumlah Rumah terhadap Jumlah Rumah Standar	Jumlah	Total Indeks
1	Alliritengae	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
2	Boribellaya	122,67	747,27	869,94	434,97
3	Pettuadae	340,95	732,90	1.073,85	536,93
4	Bajubodoa	290,19	742,46	1.032,65	516,33
5	Allepolea	290,19	740,88	1.031,07	515,54
Jumlah		2.044,00	3.963,51	6.007,51	3.003,77
Nilai Tengah		561,34	866,45		

Sumber : - Hasil Perhitungan

Lampiran B
Penilaian Kegiatan Pendidikan

No	Kelurahan	Jumlah Sekolah				Jumlah Murid				Jumlah Guru			
		TK	SD	SLP	SLA	TK	SD	SLP	SLA	TK	SD	SLP	SLA
1	Alliritengae	5	8	7	3	266	1.785	1.493	998	13	77	143	81
2	Boribellaya	-	4	-	-	-	889	-	-	-	30	-	-
3	Pettuadae	-	8	1	-	-	1.628	26	-	-	67	2	-
4	Bajubodoa	-	7	1	1	-	1.551	323	520	-	54	32	32
5	Allepolea	1	6	2	1	35	1.133	642	279	2	48	83	18
Jumlah		6	33	11	5	301	6.986	2.484	1.797	15	276	260	131

Sumber : - Kantor P & K Kab. Dati II Maros tahun 1999
- Tabel 3.7

Lampiran B.1
Angka Variabel Kegiatan Pendidikan

No	Kelurahan	Jml Fasilitas terhadap Jml Penduduk				Jml Murid terhadap Jml Penduduk				Jml Guru terhadap Jml Penduduk			
		TK	SD	SLP	SLA	TK	SD	SLP	SLA	TK	SD	SLP	SLA
1	Alliritengae	0,0004	0,0007	0,0006	0,0002	0,0222	0,1487	0,1244	0,0832	0,0011	0,0064	0,0119	0,0067
2	Boribellaya	-	0,0007	-	-	-	0,1630	-	-	-	0,0055	-	-
3	Pettuadae	-	0,0007	0,0001	-	-	0,1435	0,0023	-	-	0,0059	0,0001	-
4	Bajubodoa	-	0,0006	0,0001	0,0001	-	0,1362	0,0284	0,0457	-	0,0047	0,0028	0,0028
5	Allepolea	0,0001	0,0007	0,0002	0,0001	0,0042	0,1368	0,0775	0,0337	0,0002	0,0058	0,0100	0,0022
Jumlah		0,0005	0,0034	0,0010	0,0004	0,0264	0,7282	0,2326	0,1626	0,0013	0,0283	0,0248	0,0117

Sumber : - Hasil Perhitungan

Lampiran B.2
Indeks Variabel Kegiatan Pendidikan

No	Kelurahan	Jml Fasilitas terhadap Jml Penduduk				Jml Murid terhadap Jml Penduduk				Jml Guru terhadap Jml Penduduk				Jumlah	Total Indeks
		TK	SD	SLP	SLA	TK	SD	SLP	SLA	TK	SD	SLP	SLA		
1	Alliritengae	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	912,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.912,27	1.000,00
2	Boribellaya	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	859,78	-	-	2.859,78	240,07
3	Pettuadae	-	1.000,00	166,67	-	-	880,37	18,49	-	-	921,88	8,40	-	2.995,81	251,45
4	Bajubodoa	-	857,14	166,67	500,00	-	835,58	228,30	549,28	-	734,38	235,29	417,91	4.524,55	379,82
5	Allepolea	333,33	1.000,00	333,33	500,00	189,19	839,26	622,99	405,05	181,82	906,25	840,34	328,36	6.479,92	543,97
Jumlah		1.333,33	4.857,14	1.666,67	2.000,00	1.189,19	4.467,48	1.869,78	1.954,33	1.181,82	4.422,29	2.084,03	1.746,27	28.772,33	2.415,35
Nilai Tengah		666,67	928,57	583,34	750,00	594,60	917,79	509,25	702,53	590,91	867,19	504,20	664,18		

Sumber : - Hasil Perhitungan

Lampiran C
Penilaian Kegiatan Perdagangan

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Toko	Jumlah Warung/Kios
1	Alliritengae	12.001	74	722
2	Boribellaya	5.453	3	11
3	Pettuadae	11.343	5	17
4	Bajubodoa	11.385	3	39
5	Allepolea	8.282	2	8
Jumlah		48.464	87	797

Sumber : - Tabel 3.8

Lampiran C.1
Angka Variabel Kegiatan Perdagangan

No	Kelurahan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)	Jumlah Rumah terhadap Jumlah Rumah Standar
1	Alliritengae	0,0062	0,0602
2	Boribellaya	0,0006	0,0020
3	Pettuadae	0,0004	0,0015
4	Bajubodoa	0,0003	0,0034
5	Allepolea	0,0002	0,0097
Jumlah		0,0077	0,0768

Sumber : - Hasil Perhitungan

Lampiran C.2
Indeks Variabel Kegiatan Perdagangan

No	Kelurahan	Jumlah Toko terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Kios terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah	Total Indeks
1	Alliritengae	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
2	Boribellaya	96,77	33,22	129,99	65,00
3	Pettuadae	64,52	24,92	89,44	44,72
4	Bajubodoa	48,39	56,48	104,87	52,44
5	Allepolea	32,26	151,13	183,39	91,70
Jumlah		1.241,94	1.265,75	2.507,69	1.253,86
Nilai Tengah		516,13	512,46		

Sumber : - Hasil Perhitungan

Lampiran D
Penilaian Kegiatan Industri

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Industri	Jumlah Tenaga Kerja
1	Alliritengae	12.001	24	45
2	Boribellaya	5.453	21	48
3	Pettuadae	11.343	20	39
4	Bajubodoa	11.385	17	33
5	Allepolea	8.282	13	28
Jumlah		48.464	95	193

Sumber : - Tabel 3.9

Lampiran D.1
Angka Variabel Kegiatan Industri

No	Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja terhadap Jumlah Industri	Jumlah Tenaga Kerja terhadap Jumlah Penduduk
1	Alliritengae	1,8750	0,0037
2	Boribellaya	2,2857	0,0088
3	Pettuadae	1,9500	0,0034
4	Bajubodoa	1,9412	0,0029
5	Allepolea	2,1538	0,0034
Jumlah		10,2057	0,0222

Sumber : - Hasil Perhitungan

Lampiran D.2
Indeks Variabel Kegiatan Industri

No	Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja terhadap Jumlah Industri	Jumlah Tenaga Kerja terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah	Total Indeks
1	Alliritengae	820,32	420,45	1.240,77	620,39
2	Boribellaya	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
3	Pettuadae	853,13	386,36	1.239,49	619,75
4	Bajubodoa	849,28	329,55	1.178,83	589,42
5	Allepolea	942,29	386,36	1.328,65	349,89
Jumlah		4.465,02	2.522,72	6.987,74	3.179,45
Nilai Tengah		910,16	664,78		

Sumber : - Hasil Perhitungan

Lampiran E
Penilaian Kegiatan Pertanian

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Daerah (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Jumlah Petani
1	Alliritengae	12.001	1.015	187,00	828,00	97
2	Boribellaya	5.453	3.772	824,90	2.947,10	623
3	Pettuadae	11.343	2.815	666,80	2.148,20	846
4	Bajubodoa	11.385	3.324	298,80	3.025,20	2.961
5	Allepolea	8.282	2.415	906,50	1.508,50	629
Jumlah		48.464	13.341	2.884,00	10.457,00	5.156

Sumber : - Tabel 3.1 dan 3.6

Lampiran E.1
Angka Variabel Kegiatan Pertanian

No	Kelurahan	Luas Lahan Sawah terhadap Luas Daerah	Luas Lahan Kering terhadap Luas Daerah	Jumlah Petani terhadap Penduduk
1	Alliritengae	0,1842	0,8158	0,0081
2	Boribellaya	0,2187	0,7813	0,1142
3	Pettuadae	0,2369	0,7631	0,0746
4	Bajubodoa	0,0899	0,9101	0,2601
5	Allepolea	0,3754	0,6246	0,0759
Jumlah		1,1051	3,8949	0,5329

Sumber : - Hasil Perhitungan

Lampiran E.2
Indeks Variabel Kegiatan Pertanian

No	Kelurahan	Luas Lahan Sawah terhadap Luas Daerah	Luas Lahan Kering terhadap Luas Daerah	Jumlah Petani terhadap Penduduk	Jumlah	Total Indeks
1	Alliritengae	490,68	896,39	31,14	1.418,21	633,28
2	Boribellaya	582,58	858,48	439,06	1.880,12	717,63
3	Pettuadae	631,06	838,48	286,81	1.756,35	784,27
4	Bajubodoa	239,42	1.000,00	1.000,00	2.239,42	1.000,00
5	Allepolea	1.000,00	686,30	291,81	1.978,11	883,29
Jumlah		2.943,74	4.279,65	2.048,82	9.272,21	4.018,47
Nilai Tengah		619,74	843,15	515,57		

Sumber : Hasil Perhitungan

Lampiran F
Penilaian Kegiatan Transportasi

No	Kelurahan	Jalan Propinsi (Km)	Jalan Kabupaten (Km)	Jalan Desa (Km)
1	Alliritengae	4,00	9,41	6,80
2	Boribellaya	1,25	-	6,95
3	Pettuadae	7,00	-	2,50
4	Bajubodoa	-	3,00	6,80
5	Allepolea	2,00	-	11,00
Jumlah		14,25	12,41	34,05

Sumber : Tabel 3.11

Lampiran F.1
Indeks Variabel Kegiatan Transportasi

No	Kelurahan	Jalan Propinsi (Km)	Jalan Kabupaten (Km)	Jalan Desa (Km)	Jumlah	Total Indeks
1	Alliritengae	571,43	1.000,00	618,18	2.189,61	1.000,00
2	Boribellaya	178,57	-	631,81	810,38	371,10
3	Pettuadae	1.000,00	-	227,27	1.227,27	560,50
4	Bajubodoa	-	318,81	618,18	936,99	427,93
5	Allepolea	285,71	-	1.000,00	1.285,71	587,19
Jumlah		2.035,71	1.318,81	3.095,44	6.449,96	2.946,72
Nilai Tengah		589,29	659,41	613,64		

Sumber : Hasil Perhitungan

Lampiran G
Tingkat Perkembangan Kota Maros

No	Kelurahan	A																							
		B												C	D	E	F								
		TK			SD			SLP			SLA														
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Alliritengae	T	T	T	T	T	T	R	T	T	T	T	T	T	T	T	R	R	R	T	R	R	T	T	
2	Boribellaya	R	R	-	-	-	T	T	R	-	-	-	-	-	R	R	T	T	R	T	R	R	-	T	
3	Pettuadae	R	R	-	-	-	T	R	T	R	R	R	-	-	R	R	R	R	T	R	R	T	-	R	
4	Bajubodoa	R	R	-	-	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	T	T	-	R	T	
5	Allepolea	R	R	R	R	R	T	R	T	R	T	T	R	R	R	R	T	R	T	R	R	R	-	T	

Sumber : Lampiran A.2, B.2, C.2, D.2, E.2, dan F.1

Keterangan :

A. Perumahan

01 = Jumlah Penduduk
02 = Jumlah Rumah

C. Perdagangan

15 = Jumlah Toko
16 = Jumlah Kios/Warung

E. Pertanian

19 = Luas Lahan Sawah
20 = Luas Lahan Kering
21 = Jumlah Petani

B. Pendidikan

03, 06, 09, 12 = Jml Fasilitas
04, 07, 10, 13 = Jml Murid
05, 08, 11, 14 = Jml Guru

D. Industri

17 = Jumlah Industri
18 = Jumlah Tenaga Kerja

F. Transportasi

22 = Jalan Propinsi
23 = Jalan Kabupaten
24 = Jalan Desa

T = Tinggi

R = Rendah

- = Tidak ada data

Lampiran H
Rekapitulasi Penilaian Faktor Perkembangan
Di Kota Maros

No.	Kelurahan	1	2	3	4	5	6	Jumlah	Total Indeks
1.	Alliritengae	1.000,00	1.000,00	1.000,00	620,39	633,28	1.000,00	5.253,67	1.000,00
2.	Boribellaya	434,97	240,07	65,00	717,63	717,63	370,10	2.827,77	538,25
3.	Pettuadae	536,93	251,49	44,72	784,27	784,27	560,50	2.797,66	532,52
4.	Bajubodoa	516,33	379,82	52,44	1.000,00	1.000,00	427,93	2.965,94	564,55
5.	Allepolea	515,54	543,92	91,70	883,29	883,29	587,19	2.971,53	565,61
	Jumlah	3.003,77	2.415,30	1.253,30	3.179,45	4.018,47	2.945,72	16.816,57	3.200,93766,26
	Nilai Tengah	717,49	620,04	522,36	674,95	816,64	685,05		

Sumber : Lampiran A.2, B.2, C.2, D.2, E.2, dan F.1

KETERANGAN :

- 1 = Kegiatan Perumahan
- 2 = Kegiatan Pendidikan
- 3 = Kegiatan Perdagangan
- 4 = Kegiatan Industri
- 5 = Kegiatan Pertanian
- 6 = Kegiatan Transportasi